

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP).



**DINAS KOPERASI UKM,
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemudahan yang Dia berikan kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan lebih lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatalaksana Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Lampung Barat bertanggung jawab membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas Pembangunan di sektor Koperasi UKM dan Perdagangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut beberapa kinerja utama yang telah dicapai antara lain presentase koperasi sehat yang terealisasi sebesar 34% dari target 34%, presentase pertumbuhan UMKM sebesar 39% dari target 39%, serta presentase produk UMKM yang memenuhi standar terealisasi 9% dari target 9% pada tahun 2025.

Sementara itu di sektor perdagangan capaian kinerja utama yaitu PDRB sektor perdagangan memiliki tingkat capaian realisasi 109% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Lampung Barat melakukan kerjasama lintas fungsi antara lain dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perizinan usaha mikro, Dinas lingkup Deptan dalam pengolahan komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan, Dinas Kesehatan, Kementrian Agama terkait

dengan pelayanan sertifikasi Halal bagi usaha mikro, serta pihak – pihak lainnya.

Laporan Kinerja ini kami susun sebagai pemenuhan kewajiban sebagai organisasi publik kepada masyarakat dan pihak – pihak terkait guna mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan serta pertanggung jawaban kepada pimpinan atas kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam seluruh upaya mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan di tahun 2025, juga kami membuka ruang masukan yang konstruktif untuk perbaikan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

Liwa, 15 Januari 2026

KEPALA DINAS
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19770521 200501 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang diberikan kepada Instansi tersebut. Selain itu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program dalam rangka mencapai tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggung jawaban pemerintah selaku pemegang mandat kepada masyarakat selaku penerima manfaat pembangunan.

Capaian kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2025 merupakan tahun pertama capaian Rencana Strategis pada masa transisi pasca pemisah Kepala Daerah, yakni periode 2023-2025. Target kinerja yang ditetapkan antara lain presentase koperasi sehat, persentase pertumbuhan UMKM, presentase produk UMKM memenuhi standar, dan PDRB sektor perdagangan, sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

Pada pelaksanaanya, Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat mengalami perubahan, namun perubahan tersebut tidak merubah substansi terkait target kinerja hanya ada penambahan pagu anggaran yang dianggap penting untuk mendukung pencapaian kinerja juga atas kebijakan Pemerintah Pusat yang mengharuskan terjadinya perubahan anggaran.

Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan antara lain meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi dan UMKM, melalui Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Peningkatan Kualitas Produk UMKM, serta Peningkatan Wirausaha pemula.

Sementara itu di sektor perdagangan strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kontribusi PDRB sektor Perdagangan melalui kebijakan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan, Stabilisasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok, Barang Penting dan Komoditas, Optimalisasi tertib niaga dan perlindungan konsumen melalui peningkatan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP, Peningkatan Penjualan Produk Koperasi dan UMKM.

Secara umum, capaian kinerja atas sasaran kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Presentase Koperasi Sehat	%	34%	34%	100
2	Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	%	39%	39%	100
3	Persentase Produk UMKM terstandarisasi	%	9%	9%	100
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar)	Milyar rupiah	1.530,40	1.671,91	109

Pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang diperjanjikan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 11.839.413.299,12 dengan realisasi sebesar Rp. 11.608.382.252,00 Terkait dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran, secara umum sudah efisien,

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai kinerja sasaran perangkat daerah sebagaimana dijelaskan diatas ada banyak faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian kinerja, baik bersifat internal maupun eksternal. Faktor – faktor yang dimaksud antara lain regulasi, kondisi sumber daya manusia, kondisi ekonomi secara umum, kenaikan harga BBM yang mempengaruhi kenaikan harga komoditas, kemarau panjang yang sangat mempengaruhi kenaikan harga – harga bahan pokok, adanya alokasi Dana Alokasi Khusus fisik dari Pemerintah Pusat, hingga komitmen penguatan ekonomi pasca pemulihan ekonomi oleh Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai evaluasi pelaksanaan dan pencapaian target kinerja organisasi, sebagai bahan evaluasi kinerja pegawai, dan sebagai bahan masukan kepada pimpinan terkait kebijakan yang seharusnya diambil dalam upaya Pembangunan di Sektor Koperasi UKM dan Perdagangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Tugas dan Fungsi.....	2
C Struktur Organisasi.....	3
D Peran Strategis Perangkat Daerah.....	4
E Isu Strategis Perangkat Daerah	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Rencana Strategis Perangkat Daerah	6
B Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	10
C Target Kinerja Tahun 2025	22
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	
A Analisis Sumber Daya Manusia.....	29
B Analisis Sarana dan Prasarana.....	31
C Analisis Dokumen Anggaran	33
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	
A Tindak Lanjut LHE AKIP.....	34
B Capaian Kinerja	35
C Perbandingan Kinerja	58
D Realisasi Anggaran	59
E Pemanfaatan Laporan Kinerja	62
BAB V PENUTUP	
A Kesimpulan	63
B Permasalahan yang dihadapi	64
C Rekomendasi Tindak Lanjut	65

LAMPIRAN

RENCANA AKSI KINERJA

PERJANJIAN KINERJA 2025 DAN PERUBAHANNYA

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

DAFTAR TABEL.

Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Pembangunan tahun 2025.....	7
Tabel 2.2 Kerangka Pendanaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2025.....	14
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2025.....	22
Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2025.....	31
Tabel 3.2 Struktur Dokumen Anggaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2025.....	33
Tabel 4.1 Capaian Kinerja Sasaran pertama tahun 2025.....	35
Tabel 4.2 Perbandingan capaian kinerja sasaran pertama dengan tahun sebelumnya	48
Tabel 4.3 perbandingan capaian kinerja sasaran 1 dengan target jangka menengah.....	49
Tabel 4.4 Capaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2025.....	53
Tabel 4.5 Perbandingan capaian kinerja sasaran 2 dengan tahun sebelumnya	56
Tabel 4.6 perbandingan capaian kinerja sasaran 2 dengan target jangka menengah.....	56
Tabel 4.7 Perbandingan Kinerja Sasaran 1 dengan capaian kinerja provinsi	58
Tabel 4.8 Perbandingan Kinerja Sasaran 2 dengan capaian kinerja nasional	59
Tabel 4.9 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Kopdag tahun 2025	60

DAFTAR GRAFIK

Gambar 3.1 Grafik Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi 30
UKM dan Perdagangan tahun 2025

DAFTAR DIAGRAM

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan...	3
Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan tahun 2025	30
Peta Proses Bisnis Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.....	51
Peta Proses Bisnis Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro.....	52
Peta Proses Bisnis Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tindak Lanjut LHE AKIP Perangkat Daerah tahun 2025

Dokumentasi kegiatan tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud tanggung jawab dan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja secara periodik.

Sebagai upaya mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan selaku instansi yang diberi tanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pembangunan di bidang Koperasi UKM dan Perdagangan dituntut untuk senantiasa melakukan perbaikan kinerja, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja dan peran dinas untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Lampung Barat.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, target capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh level pemerintahan di atasnya, baik pada level Provinsi maupun level Nasional.

Terwujudnya sebuah tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang juga ditindaklanjuti dalam penyusunan pelaporan kinerja per urusan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Perangkat Daerah.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Lampung Barat Nomor 24 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan di bidang koperasi usaha kecil menengah, dan perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil menengah, dan perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

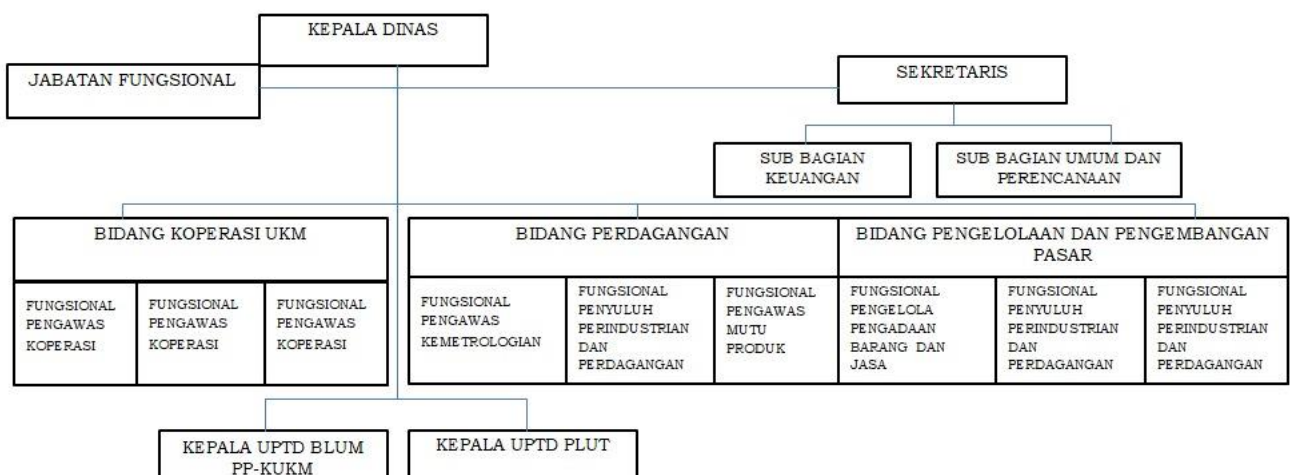
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Selanjutnya Kepala Dinas dibantu oleh satu orang sekretaris yang membawahi satu orang Kasubbag Umum dan Perencanaan dan Kasubbag Keuangan.

Selanjutnya bidang teknis di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Koperasi UKM dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh tiga orang fungsional pengawas koperasi.
2. Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan satu orang fungsional pengawas perdagangan ahli muda, fungsional analis perdagangan ahli muda.
3. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar dipimpin oleh seorang kepala kepala bidang dan dibantu oleh tiga orang fungsional analis perdagangan ahli muda.

Secara ringkas bisa dilihat dalam Bagan struktur organisasi berikut ini :

Bagan 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan



D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat bertugas membantu Bupati dalam Pembangunan di sektor ekonomi, khususnya sektor Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mendapatkan amanah kinerja mendukung peningkatan pendapatan perkapita Kabupaten Lampung Barat pada subsektor Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta sektor perdagangan.

Dalam mencapai tujuan strategis tersebut ditetapkan sasaran kinerja strategis Perangkat Daerah yakni Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja Persentase koperasi sehat, persentase peningkatan jumlah UMKM dan Persentase produk UMKM terstandar.

Selanjutnya sasaran strategis kedua yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi adalah Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan dengan indikator kinerja PDRB Sektor Perdagangan.

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Beberapa hal yang menjadi isu strategis pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sektor Koperasi UKM

Daya saing usaha koperasi dan UKM masih terkategori rendah sehingga belum mampu mendorong penyediaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kuantitas koperasi dan UKM belum mampu menghadirkan usaha yang berkualitas secara ekonomi, baik skala usaha, omset maupun laba yang dihasilkan. Kondisi tersebut dapat menghambat upaya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah yakni meningkatkan Pendapatan Perkapita.

2. Sektor Perdagangan

Rendahnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB yang menunjukkan bahwa sektor ini belum mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Lampung Barat pertumbuhan ekonominya masih didominasi oleh sektor pertanian dan Perkebunan yakni menyumbang sekitar 45% dari total PDRB Kabupaten Lampung Barat. Sementara produk pertanian haruslah memiliki nilai tambah untuk bisa meningkatkan pendapatan, tidak hanya dijual dalam bentuk komoditas mentah saja melainkan dalam bentuk produk olahan yang diyakini memiliki *value added*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

1. Strategi dan Arah Kebijakan

- Urusan Koperasi UKM

Strategi yang disusun dalam mencapai sasaran kinerja Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM adalah Peningkatan kualitas dan daya saing Koperasi dan UMKM, melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi
- b. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- c. Peningkatan Kualitas Produk UMKM
- d. Peningkatan Wirausaha pemula

- Urusan Perdagangan

Strategi yang disusun dalam mencapai sasaran kinerja Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan adalah melalui upaya peningkatan PDRB Sektor Perdagangan, melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan.
- b. Stabilisasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok, Barang Penting dan Komoditas
- c. Optimalisasi tertib niaga dan perlindungan konsumen melalui peningkatan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTP
- d. Peningkatan Penjualan Produk Koperasi dan UMKM

2. Program dan Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah

Untuk mendukung strategi dan kebijakan yang telah dituangkan dalam rencana strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Pembangunan tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun
	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN
	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan
	Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan

	penggandaan yang disediakan
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan
	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan

Kabupaten/Kota	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM terfasilitasi
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan
	Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro
	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting
Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTTP tertera sah
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi

Sumber : Dokumen Renja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 2025

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target kinerja berupa sasaran kinerja outcome, immediate outcome, maupun output yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui pola penjenjangan kinerja melalui penentuan *Critical Strategic Factor (CSF)* selanjutnya diturunkan

dibuat pohon kinerja dengan metode *logical frame work analysis*. Selanjutnya ditetapkan pohon kinerja, dituangkan dalam program kerja dan kegiatan dan disusunlah cascading kinerja yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja adalah komitmen tertulis antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati Lampung Barat terkait target yang harus dicapai sepanjang tahun 2025 yakni *outcome* yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah, komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat dibawahnya dalam hal ini setingkat Kepala Bidang masing – masing urusan yang diampu yakni berupa sasaran antara (*immediate outcome*), sampai kepada komitmen staf pelaksana dengan kepala bidang terkait output atau kinerja tataran operasional yang harus dicapai sepanjang tahun 2025.

Perjanjian Kinerja di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pada tahun 2025 mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Tahun 2025, namun perubahan tersebut tidak merubah kinerja secara substantif hanya saja menambah jumlah anggaran yang akan dipertanggung jawabkan oleh masing – masing pejabat.

Secara lebih lanjut Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Sain Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Sehat	34%
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	39%
		Persentase Produk UMKM yang Memenuhi Standarisasi	9%
2	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	1.530,40

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	3.707.453.300	APBD
2	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	41.643.000	APBD
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	47.474.000	APBD
4	Program Pemberdayaan Usaha	425.031.900	APBD

	Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	664.583.080	APBD	
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	99.624.800	APBD	
7	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	92.049.800	APBD	
8	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	45.673.000	APBD	

Adapun perjanjian kinerja perubahan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Sehat	34%
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	39%
		Persentase Produk UMKM yang Memenuhi Standarisasi	9%
2	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	1.530,4

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	3.403.450.272,12	APBD
2	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	68.792.000	APBD
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	47.474.000	APBD
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	318.533.900	APBD
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	7.872.980.427	APBD
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	55.707.100	APBD
7	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	46.402.600	APBD
8	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	26.073.000	APBD

Selanjutnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan menerima Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat, dengan kerangka pendanaan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kerangka Pendanaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2025

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Renja Murni	RKA	DPA Pengesahan	DPA Pergeseran	DPA Perubahan
A	Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.339.324.290	3.587.267.276,12	3.707.453.300		3.403.450.272, 12
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.200.000	32.715.400	36.423.700		32.715.400
2	Administrasi Keuangan	3.277.113.290	2.985.488.200	2.971.715.400		2.782.481.196

	Perangkat Daerah					
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	14.089.000	1.226.500	2.000.000		1.226.500
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.500.000	14.499.600	16.999.800		14.499.600
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.522.000	195.750.170	280.531.200		195.750.170
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.500.000	7.850.000	7.850.000		7.850.000
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.856.800	184.895.500	201.095.500		184.895.500
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	211.075.500	121.709.700	155.159.700		121.709.700

	Pemerintahan Daerah					
9.	Peningkatan Pelayanan BLUD	38.500.000	43.132.206,12	35.678.000		43.132.206,12
I	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	110.000.000	68.792.000	41.643.000		68.792.000
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, Koperasi simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/ kota	110.000.000	68.792.000	41.643.000		68.792.000
II	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	49.500.000	47.474.000	47.474.000		47.474.000
1	Pendidikan dan	49.500.000	47.474.000	47.474.000		47.474.000

	Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
III	PROGRAM PERLINDUNGAN KOPERASI	88.000.000				
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.000.000				
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	706.200.000	318.533.900	425.031.900		318.533.900
1	Pemberdayaan	706.200.000	318.533.900	425.031.900		318.533.900

	Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan					
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.680.100.000				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	8.680.100.000				
B	Sasaran 2 : Meningkatnya					

	PDRB Sektor Perdagangan					
I	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	84.364.500.000	7.872.980.427	664.583.080		7.872.980.427
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	84.183.000.000	7.300.848.727	341.746.880		7.300.848.727
2	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya	181.500.000	572.131.700	322.836.200		572.131.700
II	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	535.000.000	55.707.100	99.624.800		55.707.100

1	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	405.000.000	55.707.100	99.624.800		55.707.100
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000				
III	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	270.250.000	46.402.600	92.049.800		46.402.600
1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	270.250.000	46.402.600	92.049.800		46.402.600
IV	PROGRAM	412.000.000	26.073.000	45.673.000		41.997.500

	PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	412.000.000	26.073.000	45.673.000		26.073.000

Sumber : DPA Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 2025

C. Target Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan maka target kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Sumber data
1.	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	% Koperasi yang Sehat	Σ Koperasi sehat / Σ Koperasi x 100%	34%	Pendataan dan penilaian dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan perdagangan
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	Nilai Akhir – Nilai Awal / Nilai Awal x 100%	39%	Hasil Pembinaan dan pendataan
		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	Σ produk yang memiliki standarisasi perijinan dan sertifikasi / Σ produk x 100%.	9%	Hasil Pembinaan
2.	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	Data BPS	1530,40	Data BPS

Berikut ini Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerjanya:

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sakip OPD	Point	84,21
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	%	34
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas manjerial koperasi	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	%	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kualitas Produk UMKM	Persentase UMKM terfasilitasi	%	9
2	Meningkatnya Produk Domestik (PDRB) Saktor Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	%	60
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, dan Barang Penting	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	%	3
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen	% Alat UTTP tertera sah	%	9,40
		PROGRAM	Meningkatnya	% Produk	%	11

		PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Penjualan Produk Koperasi dan UMKM	Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya		
--	--	---	------------------------------------	--	--	--

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan , Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11
			Terlaksananya penyusunan dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Dokumen	5
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	26
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	1
				Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Orang	2
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	3
		Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2
		Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Dokumen	4
		Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit	1

	Daerah	Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12
		Tersedianya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12
		Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	14
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	3
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Pelayanan BLUD	Unit kerja	1
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit	Terlaksananya Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Unit Usaha	58

		Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	30
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Usaha Bagi UMKM	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Unit usaha	40
				Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit usaha	40
				Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	Unit usaha	500
				Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	Orang	25
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	2
				Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Dokumen	1
	PROGRAM	Menjamin	Terlaksananya	Jumlah Laporan	Laporan	48

STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kot a	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		
PROGRAM STANDARIS ASI DAN PERLINDUNG AN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya kegiatan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	unit	285
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	Orang	100
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	5

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat termasuk dalam klasifikasi Perangkat Daerah tipe B yang mengurus urusan Wajib dan Urusan Pilihan, dibawah naungan 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 tahun 2021 sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mempunyai 3 Bidang, 1 Sekretariat dan 2 UPTD yakni UPTD PP KUKM (Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Kecil Menengah) dan UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Dengan beban kerja yang cukup banyak, diperlukannya Sumber Daya Manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

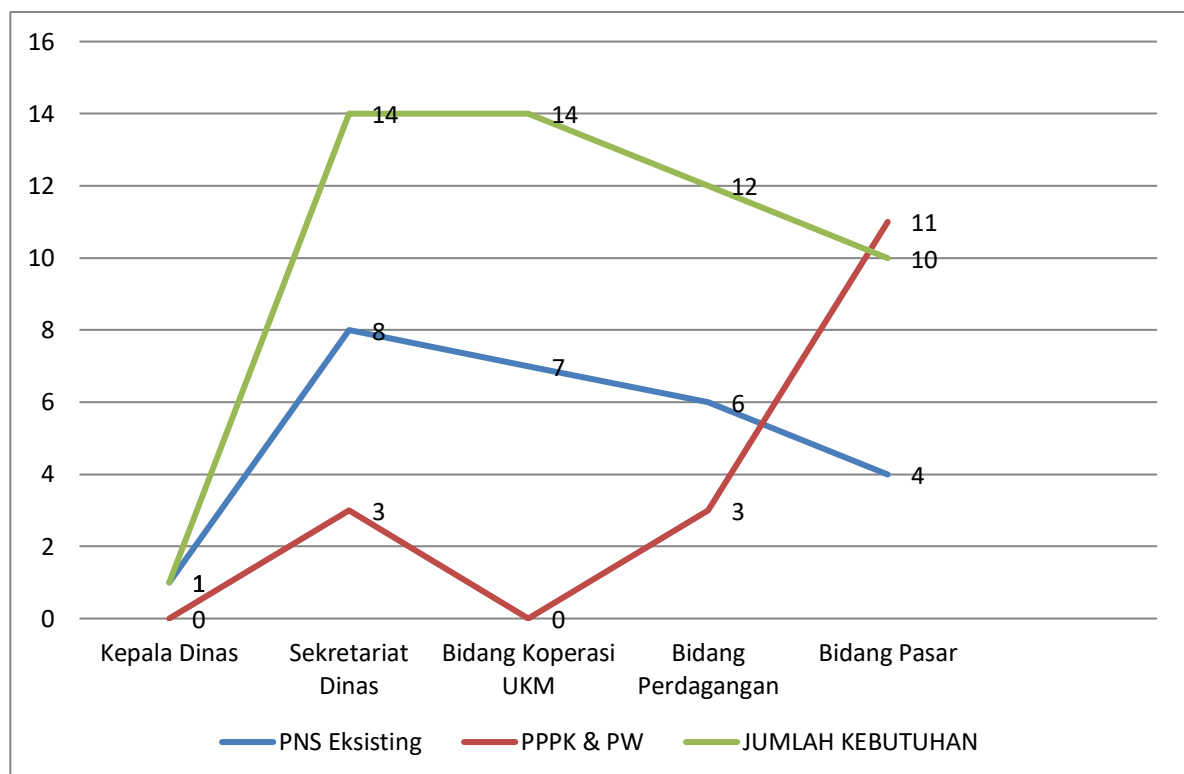
Jumlah sumber daya manusia sebanyak 43 orang terdiri dari 26 orang ASN ditambah dengan 3 tenaga kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan tenaga kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 14 orang. Dari 26 orang tersebut terdiri dari 1 orang kepala dinas, 1 orang sekretaris, 3 orang kepala bidang, 6 orang eselon IV dan 9 orang pejabat fungsional. Seyogyanya setiap bidang memiliki minimal 5 atau 6 orang staf. Jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak 51 orang, artinya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan kekurangan staf sebanyak 25 orang. Akan tetapi kekurangan tersebut didukung oleh tenaga kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh waktu, sehingga masih terdapat kekurangan 14 orang pegawai.

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting demi keberlangsungan sebuah Program Pembangunan. Kebutuhan pegawai suatu instansi mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat, baik jumlah waktu maupun kualitas. Faktor keberhasilan capaian kinerja di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Kabupaten Lampung Barat adalah mengutamakan kerjasama tim. Dalam pelaksanaan setiap program kegiatan di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dilaksanakan oleh sebuah tim yang telah dibentuk berdasarkan rekomendasi pimpinan.

Secara ringkas data kebutuhan dan ketersediaan aparatur pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat digambarkan dalam gambar berikut :

Gambar 3.1 Grafik Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2025



B. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan hal penting dalam menunjang pencapaian kinerja, oleh karena itu sarana dan prasarana Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat memiliki asset yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi UKM
dan Perdagangan Tahun 2025

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup	Rusak
1	Meja Biro	6	6	0	0
2	Meja 1/2 Biro	53	53	0	0
3	Kursi Biro	4	4	0	0
4	Kursi 1/2 Biro	10	10	0	0
5	Kursi Staff Lipat	56	56	0	0
6	Faxcimile	1	1	0	0
7	Komputer	2	2	0	0
8	Komputer PC	2	2	0	0
9	Almari/rak arsip	2	2	0	0
10	Filling Cabinet	8	8	0	0
11	Brankas	2	2	0	0
12	Telepon	1	1	0	0
13	Lemari kayu	6	6	0	0
14	Kamera Digital	1	1	0	0
15	Laptop	6	5	0	0
16	Printer	6	6	0	0
17	Stavol	1	1	0	0
18	UPS	1	1	0	0
19	Meja tamu	4	4	0	0
20	LCD	2	2	0	0
21	Komputer BLUD	1	1	0	0
22	Laptop BLUD	2	2	0	0

23	Printer BLUD	2	2	0	0
24	Meja Produksi	10	10	0	0
39	Anak Timbangan kelas M2 Kap. 5 kg	2	2	0	0
40	Anak timbangan keals M2 Kap. 10	2	2	0	0
41	kg	2	2	0	0
42	Anak Timbangan kelas M2 Kap. 20	1	1	0	0
43	kg	25	25	0	0
44	Alat Uji Dacin	1	1	0	0
45	Anak Timbangan Bidur M2 Kap. 20	1	1	0	0
46	kg				
47	Termometer digital 100'/c 0, 1'c	1	1	0	0
48	Anak Timbangan Remidi (kelas M2				
49	Kap.1g-1kg	1	1	0	0
50	Anak Timbangan Miligram kelas M1 (1	1	1	0	0
51	mg- 500 mg)	2	2	0	0
52	Termohygrometer	1	1	0	0
53	Dehumidifier	1	0	1	0
54	Air Cinditioner	1	0	1	0
55	Mobil Toyota Rush	1	0	0	0
56	Mobil Daihatsu Taruna	1		1	0
57	Toyota Kijang,	2		2	0
58	Mobil Isuzu Elp/Mobil Metrologi	1		1	0
59	Motor Honda Win	1		1	0
60	Suzuki Shogun				
61	Suzuki RC. 100				
62	Motor Honda Beat				
62	Prasarana Pendukung Gedung PLUT	1	1		
		Paket	Paket		

Sumber : Pengelola Barang Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan ; 2025

Ketersediaan sarana dan prasarana diatas belum mampu mengakomodir semua kebutuhan yang menunjang pencapaian kinerja pegawai. Idealnya satu pegawai memiliki satu perangkat elektronik baik itu personal

komputer maupun laptop, namun saat ini dengan kondisi struktur yang ada kondisi ideal tersebut belum bisa terpenuhi.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan telah diterapkan penerapan teknologi informasi baik dari sisi perencanaan, pengelolaan keuangan maupun proses pelayanan. Dalam pelaksanaan perencanaan Pembangunan dan pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan aplikasi LPSE atau pengadaan berbasis elektronik. Selain itu, pemanfaatan aplikasi OSS, sertifikasi dan perijinan online lainnya juga diterapkan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi di perangkat daerah ini.

C. Analisis Dokumen Anggaran

Tabel 3.2 Struktur Dokumen Anggaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2025

No	Uraian	DPA murni 2025	DPA Perubahan 2025	Alasan Perubahan
1	Belanja Pegawai	2.970.460.400	2.784.637.396	Penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai
2	Belanja Barang Dan Jasa	1.735.578.400	1.674.699.976,12	Efisiensi dan efektivitas anggaran
3	Belanja Hibah	40.000.000	35.000.000	Pengurangan hibah pada organisasi pendukung kinerja dinas
4	Belanja Modal	377.494.080	7.345.075.927	Pembayaran sisa pekerjaan melampaui tahun anggaran
	TOTAL	5.123.532.880	11.839.413.299,12	

Sumber : Dokumen Anggaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan ; 2025

BAB IV

AKUNTABILITAS

A. Tindak Lanjut LHE AKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat merekomendasikan agar memberikan reward terhadap pegawai yang sangat baik kinerjanya dan punishment terhadap pegawai yang sangat buruk kinerjanya serta memaksimalkan penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai dasar pemberian TPP

Gambar 1

TINDAK LANJUT LHE AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Jl. Mawar No. 01 Way Mengaku, Lings 34812 Telp (0726) 21066
Laman : www.kabupatirlampungbarat.go.id | info@kabupatirlampungbarat.go.id

Lings, 2 Juli 2025

Nomor : 050/ 236 /III.19/VII/2025
Lampiran : 1 (Eksemplar)
Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025

Yth. Bupati Lampung Barat
Cc. Inspektur Kab. Lampung Barat

Di - Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Lampung Barat Nomor: 700/ lbe-71/II/2025 tanggal 26 Mei 2025 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

Atas dasar tersebut diatas, kami sampaikan data dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan pengertian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TRIUMARYANI, S.P., M.Si
NIP. 19751229 199902 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati/Wakil Bupati Lampung Barat (Sebagai Laporan)

**PROGRES TINDAK LANJUT LHE SAKIP TAHUN 2025
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN**

NO	REKOMENDASI LHE	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN
1	Memberikan reward terhadap pegawai yang sangat baik kinerjanya dan punishment terhadap pegawai yang sangat buruk kinerjanya serta memaksimalkan penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai dasar pemberian TPP	Rencana tindak lanjut untuk memberikan reward dan punishment bagi pegawai di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah dengan mengimplementasikan system reward dengan persentase maksimal indikator kinerja pada TPP dan usulan promosi jabatan, serta system punishment seperti teguran dan persentase sesuai indikator kinerja pada TPP. Penerapan persentase maksimal indikator kinerja yang dimaksud menggunakan Aplikasi E-Kinerja yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan didasarkan pada daftar hadir yang menggunakan absensi. Selain itu, memaksimalkan penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan memberikan TTP berdasarkan kinerja dan kontribusi pegawai, serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala dengan transparan dan adil	2 Bulan	Agustus – September 2025	Sekretaris Dinas	Telah Dilaksanakan


 KERALA DINAS
 KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TRI UMARYANI, S.P., M.Si.
 NIP. 19751229 199902 2 001

B. Capaian Kinerja tahun 2025

- Sasaran pertama:** Meningkatnya kualitas dan daya saing koperasi dan UKM

Pencapaian kinerja sasaran pertama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

tabel 4.1 Capaian Kinerja Sasaran Pertama tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	% Koperasi yang Sehat	34%	34%	100%
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	39%	39%	100%
		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	9%	9%	100%

Sumber : Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan ; 2025

1. Indikator Kinerja % Koperasi Yang Sehat

Kesehatan koperasi merupakan indikator penting dalam mengukur Kualitas dan Daya Saing Koperasi. Untuk mencapai dan mempertahankan status koperasi yang sehat, diperlukan serangkaian kegiatan pendukung yang komprehensif dan terstruktur. Berikut adalah kegiatan-kegiatan utama yang mendukung tercapainya indikator koperasi sehat.

a. Penilaian Kesehatan Koperasi

Melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan aspek kelembagaan, usaha, keuangan, dan kepatuhan terhadap Rapat Anggota Tahunan (RAT). Penilaian ini menggunakan standar yang telah ditetapkan untuk mengukur tingkat kesehatan dan kinerja koperasi secara objektif.

b. Pendampingan Manajemen dan Tata Kelola Koperasi

Memberikan pelatihan terkait manajemen resiko usaha koperasi, bimbingan dan konsultasi kepada pengurus dan pengelola koperasi dalam menjalankan manajemen organisasi yang efektif. Pendampingan mencakup aspek perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan implementasi tata kelola yang baik (good cooperative governance).

c. Fasilitasi Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Memfasilitasi penyelenggaraan RAT yang merupakan forum tertinggi dalam organisasi koperasi. Kegiatan ini meliputi persiapan administrasi, penyusunan agenda, dan memastikan RAT berjalan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Pelatihan Akuntansi Koperasi & Digitalisasi Pembukuan

Menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengurus dan staf koperasi dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan. Pelatihan juga mencakup implementasi sistem pembukuan digital untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pencatatan keuangan.

e. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja koperasi untuk memastikan pencapaian target dan identifikasi dini terhadap potensi masalah. Kegiatan ini mencakup kunjungan lapangan, analisis laporan keuangan, dan penyusunan rekomendasi perbaikan.

➤ **Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi Tahun 2025**

NO	KEGIATAN	PESERTA	MATERI	NARASUMBER	OUTCOME (HASIL)
1	2	3	4	5	6
1.	Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Koperasi (Gedung PLUT KUMKM 20 s/d 22 Agustus 2025)	30 Orang Pengurus Koperasi	✓ Penerapan khusus tentang penerapan manajemen resiko ✓ manajemen resiko ✓ Strategi Pengembangan usaha Koperasi ✓ Tata Kelola Koperasi Berkelanjutan ✓ Partisipasi Anggota	✓ Mentor Siger Hub Inkubator Bandar Lampung	✓ Peserta mengenal dan memahami manajemen risiko ✓ Peserta memahami praktik dan implementasi manajemen risiko ✓ Peserta memahami strategi pengembangan usaha koperasi dan tantangannya ✓ Peserta memahami perbaikan tata kelola sesuai regulasi dan aturan perundang – undangan ✓ Peserta memahami bagaimana upaya peningkatan partisipasi anggota dalam mendukung usaha koperasi

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Tahun 2025 untuk Kegiatan Pelatihan dapat dikatakan berhasil karena dari target 30 Peserta Pelatihan dan terealisasi 30 Peserta Pelatihan, serta telah dilakukan perbaikan tata kelola usaha koperasi serta direncanakan tindak lanjut pelaksanaan Uji Kompetensi Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Unit usaha simpan pinjam. Terkait dengan pencapaian kinerja sasaran hingga kinerja output dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kolaborasi antar lintas sektor. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tidak hanya berfokus pada kinerja instansi semata, namun juga menggandeng dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung, para trainer dan praktisi peningkatan kompetensi, serta pihak eksternal lainnya.
- Intensitas pendampingan yang dilakukan oleh konsultan pendamping PLUT meski dengan segala keterbatasan yang ada, tetap mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Kendala yang dihadapi :

1. Keterbatasan kemampuan SDM Koperasi dalam manajemen yang berdampak pada belum maksimalnya pengelolaan manajemen Koperasi secara efektif dan efisien baik dari segi kelembagaan, keuangan hingga manajemen Sumber Daya Manusia;
2. Masih banyak terdapat Koperasi yang belum mengetahui peraturan perundang-undang yang berlaku tentang pengelolaan usaha Koperasi.

Solusi Penyelusaian :

1. Materi pelatihan yang dilaksanakan difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM dalam perbaikan tata kelola khususnya kelembagaan, pengelolaan Keuangan, dan Sumber Daya Manusia Koperasi secara efektif dan efisien;
2. Memaksimalkan peran Tenaga Pendamping PLUT Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan pendampingan Perizinan Berusaha Koperasi serta mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan pengelolaan Koperasi yang berlaku.

Foto Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi Tahun 2025



(Dokumentasi diambil dari arsip kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2025)

➤ **Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2025**

No	Kegiatan	Target Output	Target Hasil
1	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah ayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	58 unit koperasi	✓ Koperasi melaksanakan RAT ✓ Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi ✓ Perbaikan tata kelola koperasi

Sub Kegiatan Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota Tahun 2025 telah dilaksanakan terhadap 58 unit koperasi. Terkait dengan pencapaian kinerja sasaran hingga kinerja output dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Koordinasi yang dilakukan secara intensif antara fungsional pengawas koperasi dengan pihak Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung, sehingga pelaksanaan pengawasan maupun pendampingan bisa berjalan, meski tidak sempurna namun pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan tahun 2025 sudah lebih teratur dan tertib mengikuti aturan yang ada.
- Pendampingan juga dilakukan bekerjasama dengan pendamping koperasi yang saat ini terintegrasi dengan pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu.

Kendala yang dihadapi :

1. Keterbatasan sumber daya manusia. SDM Pengawas koperasi di Kabupaten Lmapung Barat hanya berjumlah 3 orang dengan objek pengawasan yang cukup besar, membuat pelaksanaan pengawasan dan pembinaan menjadi tidak mampu menjangkau semua koperasi namun hanya bisa menjangkau 58 koperasi;
2. Kebijakan pendirian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menambah tugas tambahan bagi pengawas koperasi yang juga dilibatkan dalam pendirian dan pembinaan KDKMP sehingga pembinaan pada koperasi non KDKMP tidak semasif tahun – tahun sebelumnya.

Solusi Penyelusaian :

1. Pembinaan dan pengawasan tidak selalu tatap muka, tapi dilaksanakan secara hybrid perpaduan antara tatap muka dan online;
2. Pembinaan tidak semasif tahun sebelumnya, namun informasi dan perbaikan tata kelola tetap dilaksanakan melalui group-group pembinaan koperasi.

Foto Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2025



(Dokumentasi diambil dari arsip kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2025)

2. Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah UMKM

persentase peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dengan target sebesar 39% tercapai secara penuh di angka yang sama, menghasilkan capaian 100%. Hal ini mencerminkan efektivitas dari berbagai kegiatan utama pendukung yang telah dilaksanakan. Berikut adalah kegiatan-kegiatan pendukung tersebut:

a. Pendataan & Legalisasi UMKM (NIB, OSS)

Salah satu langkah awal yang krusial dalam peningkatan jumlah UMKM adalah pendataan dan legalisasi. Melalui proses pendaftaran yang sistematis, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS), UMKM dapat memperoleh legalitas yang

diperlukan untuk beroperasi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengakuan resmi kepada usaha, tetapi juga membuka akses kepada berbagai program pemerintah.

b. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan merupakan kegiatan penting yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku UMKM dan wirausaha pemula. Dengan program pelatihan yang terstruktur, pelaku usaha dilatih mengenai manajemen, pemasaran, serta pengembangan produk. Kegiatan ini memastikan bahwa para pengusaha memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara efektif.

c. Fasilitasi Akses Permodalan

Akses terhadap permodalan sering menjadi kendala bagi UMKM. Untuk mengatasi hal ini, program fasilitasi akses permodalan diperkenalkan, termasuk kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan Formal dan melalui UPTD KUMKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, pelaku usaha dapat memperoleh modal yang diperlukan untuk investasi dan pengembangan usaha, sehingga mendukung pertumbuhan jumlah UMKM.

d. Inkubasi Bisnis

Inkubasi bisnis merupakan kegiatan yang dirancang untuk mendukung UMKM dalam tahap awal operasional mereka. Program ini menyediakan bimbingan, fasilitas, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membantu pelaku usaha memulai dan mengembangkan usaha mereka. Melalui dukungan yang komprehensif, UMKM dapat mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan dengan mengoptimalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

➤ **Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2025**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu sepanjang tahun 2025 sejak Bulan Januari sampai dengan Desember. UMK yang dilayani PLUT pada tahun 2025 sebanyak 550 unit usaha yang terdiri dari pelaku usaha mikro kecil perorangan sebanyak 415 unit usaha ditambah dengan koperasi desa/kelurahan merah putih sebanyak

135 unit usaha. Fasilitas yang diberikan mulai dari pelatihan, perizinan, konsultasi bisnis, fasilitas pemasaran dan lain-lain.

Kegiatan ini merupakan Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu dan Pengembangan UMKM yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan juga daya saing UMKM. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Inkubasi bisnis UMKM, dilaksanakan sesuai dengan Juknis Pelaksanaan Inkubasi
- b. Penyediaan layanan konsultasi bisnis dan pendampingan oleh Konsultan Pendamping
- c. Penyediaan fasilitas pemasaran produk UMKM
- d. Memberikan pendampingan terkait fasilitas pemasaran, pembiayaan, kapasitas dan kualitas produksi oleh konsultan pendamping dan juga pegawai yang membidangi inkubasi bisnis

Kendala yang dihadapi :

1. Kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan pendampingan tidak optimal
2. Layanan inkubasi bisnis baru terealisasi di bulan oktober 2025 dengan kontrak tenant selama satu tahun sampai dengan bulan oktober 2026. Inkubasi adalah sebuah Langkah inovatif para konsultan PLUT untuk melakukan intensifikasi pendampingan terkait pengembangan usaha dan kelas UMKM. Namun mengingat ini adalah tahun pertama pelaksanaan program inkubasi bisnis, maka masih dilakukan banyak penyesuaian dalam pelaksanaannya, terutama dari sisi UMKM yang menjadi tenant inkubasi masih belum semuanya membuka diri dalam inovasi produk.

Solusi Penyelesaian :

1. Optimalisasi pendampingan yang dilaksanakan oleh Konsultan Pendamping PLUT
2. Kemitraan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dengan berbagai Lembaga seperti Universitas Islam Internasional Indonesia, Dimana Kabupaten Lampung Barat menjadi lokus program pengabdian Masyarakat melalui sosialisasi ekspor halal ke Negara Asia Tenggara, Kerjasama dengan Adhyaksa yakni program UMKM

Binaan Adhyaksa, Kerjasama inkubasi bisnis secara informal dengan para pelaku usaha menengah dan incubator swasta.

Foto Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2025



(Dokumentasi diambil dari arsip kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2025)

➤ Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Tahun 2025

NO	KEGIATAN	MATERI	NARASUMBER	OUTCOME (HASIL)
1	2	3	4	5
1.	Pelatihan Vocasional Bidang Kuliner	✓ Masakan resto dan catering ✓ Bolu Ubi Jalar ✓ Kue Lumpur Ubi Jalar	✓ RMP Bandar Lampung ✓ Home Cake	✓ Peserta mampu mengolah makanan kuliner dengan citra rasa resto ✓ Peserta mampu mengolah olahan ubi jalar dengan resep modern ✓ Peserta bisa memodifikasi jajanan pasar berbahan baku ubi jalar yang menarik ✓ Peserta bisa mengembangkan usaha dengan menu-menu variatif

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kopetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Latihan tahun 2025. Sub Kegiatan ini bermuatan Pelatihan Vocasional Bidang Kuliner yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang pelaku Usaha Mikro dan Kecil, wirausaha pemula, calon wirausaha bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dalam mengolah produk kuliner berbahan baku lokal, khususnya ubi jalar. Melalui

materi yang disampaikan oleh narasumber dari RMP Bandar Lampung dan Home Cake, peserta memperoleh pengetahuan dan praktik langsung dalam mengolah masakan restoran dan catering, serta pembuatan bolu dan kue lumpur berbahan dasar ubi jalar.

Hasil dari pelatihan ini menunjukkan bahwa peserta mampu meningkatkan keterampilan dalam mengolah makanan dengan cita rasa yang lebih modern dan menarik, memodifikasi jajanan tradisional menjadi produk bernilai tambah, serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha kuliner dengan variasi menu yang lebih inovatif. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya usaha kuliner baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, hal yang paling mendasar juga adalah ketercapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang dibebankan kepada Bidang Koperasi UKM. Beberapa hal yang mendukung ketercapaian kinerja antara lain :

1. Kemitraan yang dibangun dengan berbagai pihak
2. Dukungan regulasi pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM
3. Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu

Kendala yang dihadapi :

1. Jumlah jam pelatihan yang terbatas disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran
2. Peserta hanya bisa menjangkau wilayah kecamatan Balik Bukit disebabkan keterbatasan sumberdaya sehingga panitia tidak mampu menyiapkan akomodasi

Solusi Penyelesaian :

1. Memaksimalkan waktu yang ada dengan meminimalisir teoritis, jam pelatihan dioptimalkan untuk workshop
2. Pengembangan pasca pelatihan melalui forum-forum informal pelaku usaha mikro kuliner atau olahan pangan

Foto Kegiatan Pelatihan Keterampilan Teknis UMKM Tahun 2025



(Dokumentasi diambil dari arsip kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2025)

3. Indikator Kinerja Persentase (%) Produk UMKM yang Memenuhi Standarisasi

Indikator ini mengukur proporsi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari aspek legalitas, mutu produk, keamanan, kemasan, maupun persyaratan perizinan usaha. Standarisasi yang dimaksud dapat mencakup kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, PIRT, sertifikasi mutu, serta pemenuhan ketentuan pelabelan dan kemasan produk. Pada tahun 2025, target sebesar 9% produk UMKM yang memenuhi standar telah tercapai sepenuhnya dengan realisasi sebesar 9%, sehingga tingkat capaian indikator mencapai 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas program pemberdayaan dan pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM. Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui:

a. Pendataan UMKM

Dilakukan untuk memperoleh basis data yang akurat terkait profil usaha, jenis produk, dan tingkat kesiapan standarisasi sebagai dasar intervensi program.

b. Penguatan Kemitraan

Fasilitasi kerja sama antara UMKM dengan dunia usaha, lembaga pembiayaan, lembaga sertifikasi, serta ritel modern guna memperluas akses pasar dan mendorong pemenuhan standar produk.

c. Kemudahan Perizinan

Pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, sertifikasi halal, dan izin edar lainnya guna meningkatkan legalitas usaha dan produk.

d. Penguatan Kelembagaan

Pembinaan kelompok/komunitas UMKM agar memiliki tata kelola yang lebih baik, meningkatkan kapasitas manajerial, serta memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok.

e. Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga sertifikasi, serta stakeholder terkait untuk mempercepat proses standarisasi dan memperluas dukungan pembinaan.

Dengan strategi pemberdayaan yang terintegrasi tersebut, UMKM tidak hanya didorong untuk memenuhi standar administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

➤ **Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Tahun 2025**

Salah satu Upaya untuk meningkatkan daya saing dan volume usaha bagi pelaku usaha mikro Adalah penyediaan fasilitasi perizinan maupun sertifikasi. Pada tahun 2025 usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan sebanyak 20 UMK di antaranya 5 UMK Olahan Daging secara Reguler dan 15 UMK produk olahan dengan *Self Declare*

Berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor : 518/196/III.19/VI/2025 tanggal 9 Juni 2025. Kemitraan dengan BSPJI Lampung yang telah berpengalaman dalam mendampingi dan memfasilitasi pelaku usaha menjadikan program fasilitasi sertifikasi halal regular sebanyak 5 UMK Olahan Daging dilaksanakan mulai 1 Juni 2025 s.d 30 Desember 2025 akan tetapi sebelum kontrak berakhir fasilitasi sertifikasi halal telah selesai dilaksanakan.

Sertifikasi Halal dengan *Self Declare* sebanyak 15 UMK non olahan daging dilaksanakan oleh Konsultan Pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Kendala yang dihadapi :

Meskipun secara umum target kinerja telah tercapai, namun beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran dan program antara lain:

4. Kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan pendampingan tidak optimal
5. Kompleksitas persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal regular bagi UMK olahan daging menjadi tantangan tersendiri dalam pendampingan, bahkan sejak dilakukan seleksi beberapa calon pelaku usaha yang akan di damping tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Foto Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Tahun 2025



(Dokumentasi diambil dari arsip kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2025)

Tabel 4.2 Perbandingan capaian kinerja sasaran 1 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi kinerja 2024	Realisasi kinerja 2025
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	% Koperasi yang Sehat	32.3%	34%	34%
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	29,2%	29%	39%
		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	3%	6%	9%

Sumber : Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan; 2025

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran pertama yakni persentase koperasi sehat, persentase peningkatan jumlah UMKM dan Persentase Produk UMKM yang memenuhi standar secara umum mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Khusus indikator kinerja Persentase Produk UMKM yang memenuhi standarisasi adalah indikator yang baru ditetapkan dalam periode Renstra tahun 2024 – 2026, dimana dalam periode sebelumnya indikator ini belum ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.

Tabel 4.3

Perbandingan capaian kinerja sasaran 1 dengan target jangka menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target jangka menengah	Realisasi kinerja 2025
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	% Koperasi yang Sehat	35%	34%
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	49%	39%
		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	12%	9%

Sumber : Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan ; 2025

Berdasarkan table 4.3 diatas terlihat bahwa untuk kinerja koperasi sehat telah mencapai target jangka menengah organisasi, oleh karenanya hal ini perlu dilakukan evaluasi rencana jangka menengah untuk dilakukan penyesuaian target kinerja yang telah melampaui target.

a. Faktor penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian kinerja pada sasaran pertama adalah

1. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
2. Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak eksternal baik lembaga keuangan non bank, lembaga perbankan, pihak universitas maupun komunitas - komunitas UMKM dalam hal pembiayaan bagi UMKM maupun penyediaan akses pemasaran produk UMKM.
3. Pendampingan koperasi oleh tenaga pendamping lapangan Kementrian Koperasi dan UKM
4. Adanya dukungan Kinerja Instansi terkait, seperti dukungan program Kredit bagi Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan oleh Bank Penyalur KUR dan koordinasi dari bagian Perekonomian Setdakab Lampung Barat
5. Dukungan Dinas PTSP dalam fasilitasi perizinan usaha melalui aplikasi OSS dan optimalisasi pendampingan oleh tenaga pendamping lapangan kepada pelaku usaha

b. Faktor Penghambat Capaian Kinerja

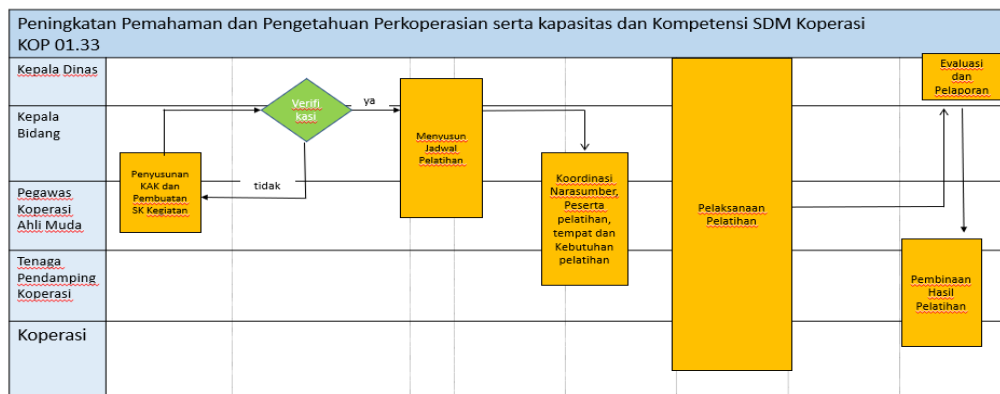
1. Sulitnya proses pembubaran terhadap 78 koperasi yang sudah tidak aktif secara kelembagaan maupun usaha sejak tahun 2020, hingga saat ini koperasi tersebut belum dibubarkan karena berkaitan dengan regulasi atas aset yang dimiliki koperasi.
2. Terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 tahun 2024 tentang usaha simpan pinjam, yang mengatur tentang koperasi simpan pinjam, yang mewajibkan koperasi Simpan Pinjam harus melakukan *self declair* yaitu pernyataan mandiri koperasi terkait dengan pilihan sistem usahanya yakni simpan pinjam terbuka atau tertutup. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan *self declaire* ini adalah pelaksanaan perbaikan tata kelola bagi koperasi yang telah dilakukan verifikasi oleh mitra Kementrian Koperasi dan UKM dan diindikasikan sebagai koperasi terbuka dalam menjalankan usahanya, mengingat temuan dilapangan koperasi - koperasi tersebut bukanlah koperasi yang sistem usaha simpan pinjamnya terbuka,

sehingga dalam penyelesaiannya diharuskan memperbaiki tata kelola sesuai UU 25 tahun 1992. Perbaikan tata kelola dimaksud menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, mengingat tidak semua koperasi bisa langsung menindaklanjuti perbaikan tata kelola tersebut.

3. Banyaknya UMKM yang tumbuh merupakan sebuah kondisi yang positif, namun terbatasnya sumber daya manusia maupun anggaran membuat belum maksimalnya capaian pembinaan yang dilakukan, atau dengan kata lain pembinaan belum bisa mencakup semua UMKM.
4. Tidak dilaksanakannya pendataan pelaku UMKM dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia membuat proses updating data sektoral menjadi terhambat. Meskipun pada praktiknya pendataan dilaksanakan oleh BPS Lampung Barat, namun Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengalami kesulitan dalam mengolah data sesuai klasifikasi yang diharapkan.

c. Gambaran Peta Proses Bisnis Pendukung Capaian Kinerja Utama

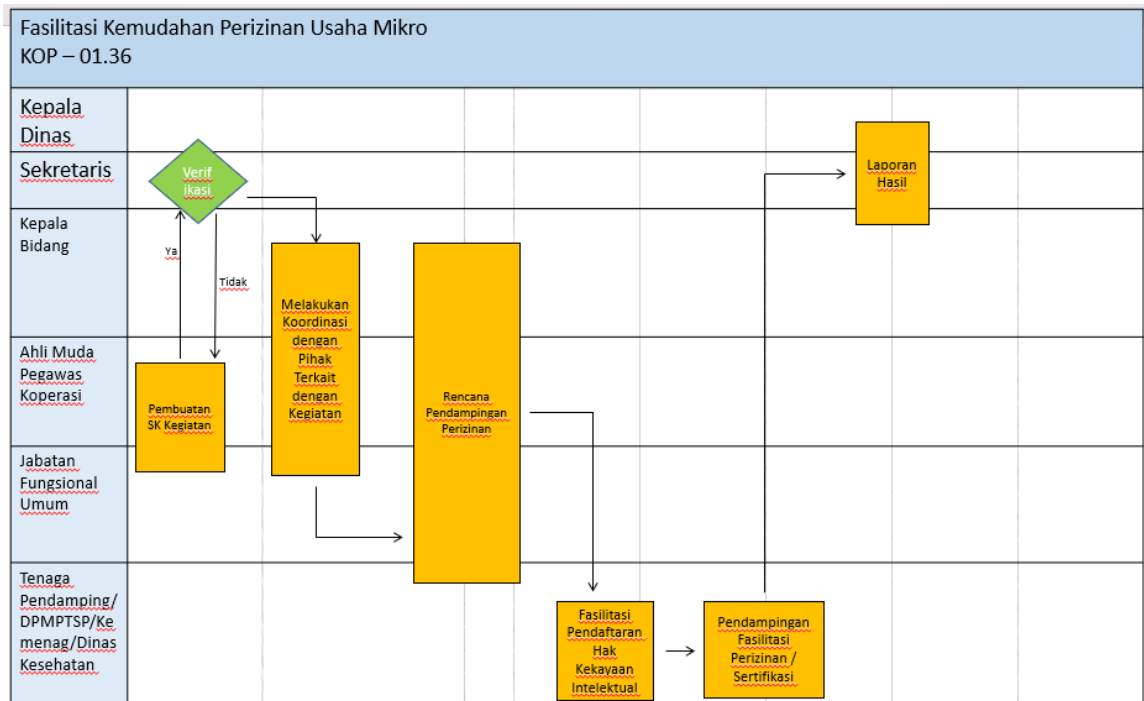
- 1) Peta Proses Bisnis Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi



Berdasarkan peta proses bisnis diatas terlihat bahwa dalam menjalankan kegiatan tingkat operasional untuk mencapai sasaran kinerja utama yakni persentase koperasi sehat, dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi, dimana kegiatan ini melibatkan pihak diluar perangkat daerah yakni Pendamping Koperasi yang merupakan mitra

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang berasal dari penugasan Kementerian Koperasi UKM. Pendamping koperasi berkontribusi dalam melakukan pendampingan kelembagaan maupun usaha koperasi, termasuk didalamnya membantu memetakan koperasi yang layak dan harus mengikuti pelatihan.

2) Peta Proses Bisnis Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro



Dalam peta proses bisnis diatas, menunjukkan bahwa dalam mencapai sasaran kegiatan yakni persentase produk UMKM terstandar dan persentase peningkatan jumlah UMKM dilaksanakan kegiatan pendampingan perizinan bagi usaha mikro, yang melibatkan banyak pihak selain aparatur perangkat daerah. Pihak yang terlibat tersebut antara lain Dinas PTSP, Kementerian Agama dan juga Dinas Kesehatan. Pihak – pihak ini bersifat koordinatif dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi perizinan dan sertifikasi. Selain pihak – pihak diatas peran pendamping UMKM sangat berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini, pendamping merupakan katalisator, fasilitator dan penggerak usaha UMKM baik dibidang perijinan, sertifikasi, pemasaran bahkan pembiayaan.

2. Sasaran kedua

Pencapaian kinerja sasaran kedua Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

tabel 4.4 Capaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	1,540,30 Milyar rupiah	1.671,91Milyar rupiah	109%

Sumber : BPS Lampung Barat ; 2025

1. Indikator Kinerja PDRB Sektor Perdagangan

Target kinerja sasaran kedua adalah PDRB Sektor Perdagangan, dimana target ini disusun berdasarkan trend data *eksisting* pada tahun penyusunan Renstra pada tahun 2023 yakni menggunakan data BPS tahun 2024 sebagai dasar perhitungan target. Kondisi ekonomi Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 merupakan kondisi pandemi covid 19 sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat sempat mengalami kontraksi pertumbuhan. Pasca kondisi normal, perekonomian Kembali bergeliat, berdasarkan angka yang dirilis oleh BPS terlihat jumlah nilai PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Lampung Barat mencapai 1.671,91 milyar rupiah atau tercapai 109% dari target yang ditetapkan, dengan rata – rata kontribusi sektor ini 10-11% pertahun. Meskipun sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi sektor yang dominan dalam PDRB Kabupaten Lampung Barat, namun setiap tahun terjadi kenaikan jumlah nilai pada sektor perdagangan. Hal ini menandakan perputaran uang di Kabupaten ini menunjukkan trend yang positif.

➤ **Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan**

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan adalah suatu kegiatan atau sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, memantau, dan melaporkan informasi harga serta ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar rakyat secara terintegrasi melalui sistem informasi perdagangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok masyarakat secara real-time dan akurat.

Barang kebutuhan pokok dan barang penting tersebut seperti: Beras, Gula pasir, Minyak goreng, Daging sapi, Daging ayam, Telur ayam, Cabai, Bawang merah dan bawang putih, Tepung terigu. Gas LPG 3 kg dan komoditas strategis lainnya

Di Lampung Barat terdapat 5 kecamatan yang dilakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting diantaranya kecamatan Balik Bukit, Sumber Jaya, Kebun Tebu, Way Tenong dan Bandar Negeri suoh

Pihak-pihak yang terlibat dan peran masing-masing dalam pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok serta barang penting di pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan:

a. Dinas Perdagangan Daerah

Peran:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan harga dan stok barang di pasar rakyat dalam wilayahnya;
- Menugaskan petugas pemantau pasar untuk melakukan survei harga dan ketersediaan barang;
- Menginput atau memverifikasi data yang diperoleh ke dalam Sistem Informasi Perdagangan;
- Melakukan analisis kondisi pasar daerah serta melaporkan hasil pemantauan kepada pemerintah pusat;
- Mengambil langkah pengendalian harga dan distribusi barang jika terjadi lonjakan harga atau kelangkaan.

b. Kementerian Perdagangan

Peran:

- Menyusun kebijakan nasional terkait pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- Mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Perdagangan nasional yang digunakan oleh daerah;
- Mengumpulkan dan menganalisis data harga dari seluruh daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemantauan harga di daerah;
- Menyusun strategi stabilisasi harga dan distribusi barang secara nasional.

c. Petugas Pemantau Pasar

Peran:

- Melakukan pengumpulan data langsung di lapangan mengenai harga dan stok barang;
- Berinteraksi dengan pedagang dan distributor untuk memperoleh informasi yang akurat;
- Menginput data hasil pemantauan ke dalam aplikasi atau sistem informasi perdagangan;
- Melaporkan perubahan harga atau potensi kelangkaan barang kepada Dinas Perdagangan;
- Memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang dilaporkan.

d. Pedagang dan Distributor

Peran:

- Memberikan informasi harga jual dan ketersediaan stok barang kepada petugas pemantau pasar.
- Menjadi sumber data utama dalam pemantauan kondisi pasar.
- Mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok kepada masyarakat.
- Berperan dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang di pasar.

e. Masyarakat sebagai Pengguna Informasi

Peran:

- Mengakses informasi harga dan ketersediaan barang yang disediakan melalui sistem informasi perdagangan.
- Menggunakan informasi tersebut sebagai referensi dalam membeli kebutuhan pokok.
- Memberikan masukan atau laporan jika terjadi perbedaan harga yang signifikan di pasar.
- Berperan sebagai pengawas sosial dalam menjaga transparansi informasi harga.

Foto kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tahun 2025



(Dokumentasi diambil dari arsip kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2025)

Tabel 4.5 Perbandingan capaian kinerja sasaran 2 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi kinerja 2024	Realisasi kinerja 2025
1	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	1.382,24	1.540,30	1.671,91

Sumber : BPS Lampung Barat ; 2025

Tabel diatas merupakan gambaran perbandingan capaian sasaran kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dalam 2 tahun terakhir. Dari data nampak trend positif pertumbuhan ekonomi Lampung Barat dari sektor perdagangan. Peningkatan PDRB sektor perdagangan berdampak positif bagi masyarakat, Peningkatan PDRB sektor perdagangan berdampak positif bagi masyarakat karena mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.6 Perbandingan capaian kinerja sasaran 2 dengan target jangka menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi kinerja 2025
1	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	1,694,33	1.671,91

Sumber : BPS Lampung Barat ; 2025

Berdasarkan table 4.6 diatas terlihat bahwa untuk kinerja koperasi sehat telah mencapai target jangka menengah organisasi, oleh karenanya hal ini perlu dilakukan evaluasi rencana jangka menengah untuk dilakukan penyesuaian target kinerja yang telah melampaui target.

a. Faktor pendukung pencapaian kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran ke 2 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat mencapai lebih dari 100%. Pencapaian ini dipengaruhi faktor – faktor berikut :

- 1) PDRB sektor perdagangan adalah perhitungan dan analisis ekonomi secara makro yang dipengaruhi banyak faktor, dan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional dan skala wilayah provinsi dalam hal ini provinsi lampung, yang bukan hanya dari sisi pengeluaran masyarakat namun juga sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat secara umum
- 2) Adanya penjualan produk UMKM dan juga komoditas keluar daerah Kabupaten Lampung Barat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan.
- 3) Pembangunan pasar tematik wisata jelajah danau ranau lumbok seminung yang merupakan kawasan wisata terpadu dengan anggaran yang sangat besar, berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan di Kabupaten Lampung Barat bersumber dari belanja pemerintah
- 4) Kondisi panen raya kopi robusta dengan harga yang cukup tinggi menaikkan pendapatan masyarakat dan mendorong kenaikan transaksi khususnya pada perdagangan kendaraan bermotor.

b. Faktor penghambat pencapaian kinerja

Dalam mencapai sebuah target kinerja, tentu ada hal – hal yang menjadi penghambat capaian. Dalam mencapai kinerja sasaran kedua ini faktor eksternal adalah hal yang paling menghambat, mengingat kondisi yang dicapai adalah kondisi makro ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal terutama iklim usaha perdagangan, sehingga pelaku usaha di Kabupaten Lampung Barat belum mampu menembus pasar luar negeri, melainkan masih menjadi pemasok bahan baku bagi sektor lain maupun pelaku usaha yang lebih besar.

c. Gambaran Peta Proses Bisnis Pendukung Capaian Kinerja Utama

1. Peta Proses Bisnis Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan



Dalam peta proses bisnis diatas, peran tim TPID menjadi sangat penting, sebagai pembuat kebijakan pengendalian inflasi, jika terjadi kenaikan harga bahan pokok dan barang penting yang tinggi. Selain itu peran Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan juga sangat krusial dalam upaya pengendalian harga bahan pokok masyarakat, laporan harian perkembangan harga bahan pokok akan langsung diinput dalam sistem pelaporan online dan terkini untuk dilakukan pemantauan dan analisis terkait kondisi harga – harga barang kebutuhan pokok di daerah.

C. Perbandingan Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 4.7 Perbandingan Kinerja Sasaran 1 dengan capaian kinerja tingkat Provinsi

No	Target Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Provinsi
1.	% Koperasi yang Sehat	34%	67,31%
2.	Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	39%	-19,29%
3	% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	9%	-

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung ; 2025

* : angka tahun 2025

Angka yang digunakan dalam data kinerja Provinsi diatas sebagiannya adalah angka tahun 2023, karena berdasarkan konfirmasi kepada Dinas terkait bahwa tidak ada pendataan pertumbuhan UMKM tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa target kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 secara umum selaras dengan target kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung, meski ada satu sasaran yang berbeda. Pada sasaran kedua terdapat perbedaan indikator namun secara substantif masih bisa diukur dan menjadi data pembandingan bagi Kabupaten Lampung Barat. Secara umum realisasi kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat masih melampaui kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung. Selanjutnya untuk tingkat nasional tidak terdapat data pembandingan dengan indikator yang sama.

Selanjutnya untuk sasaran meningkatnya PDRB sektor perdagangan dan sektor Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Perbandingan Kinerja Sasaran 2 dengan capaian kinerja Provinsi dan Nasional

No	Target Kinerja	Realisasi 2025	Kinerja Provinsi	Kinerja Nasional
1.	PDRB Sektor Perdagangan	1.671,91 Miliar	523.846,54 Miliar	23.821,1 T*

Sumber : Badan Pusat Statistik ; 2025

Keterangan :

* data 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja PDRB sektor perdagangan masih jauh berada dibawah capaian Provinsi maupun capaian Nasional. Hal ini sangat wajar, mengingat Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah pertanian dimana 49% lebih PDRB nya bersumber dari sektor pertanian. Selain itu hingga laporan ini dibuat tercatat bahwa total PDRB Kabupaten Lampung Barat menyumbang 2% terhadap total PDRB Provinsi Lampung.

D. Realisasi Anggaran

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.839.413.299,12 dengan realisasi Rp. 11.608.382.252,00 atau 98,05 %

dimana anggaran tersebut terdiri dari urusan penunjang dan juga anggaran untuk membiayai urusan wajib koperasi UKM dan urusan pilihan Perdagangan. Secara ringkas dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2025

NO	PROGRAM	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD : 84,21	Nilai Sakip OPD : 84,25 (100,05%)	94,1%	1.06	Efisien
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif : 34%	Persentase Koperasi aktif : 34% (100%)	99%	1.01	Efisien
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	% koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya (6%)	% koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya (6%) Tk. Capaian : 100%	99%	1.01	Efisien
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	Persentase UMKM terfasilitasi (9%)	Persentase UMKM terfasilitasi (9%)	95.89%	1.04	efisien

	usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Tk. Capaian Kinerja : 100%			
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi (60%)	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi (60%) Tk. Capaian Kinerja : 100%	99.78%	1	Efisien
7.	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	% rata – rata harga bahan kebutuhab pokok dan barang penting (3%)	% rata – rata harga bahan kebutuhab pokok dan barang penting (0.062%) Tk. Capaian Kinerja : 100%	99.8%	1	Efisien
8.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	% Alat UTTP Tertera sah (9,40%)	% Alat UTTP Tertera sah (9,40%) Tk. Capaian Kinerja : 100%	99.78%	1	Efisien

9.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya (11%)	Persentase Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya (13,6%) Tk. Capaian Kinerja : 100%	99.70%	1,24	Efisien
----	--	--	--	--------	------	---------

Tabel diatas adalah metode yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi sebuah program. Formulasi yang digunakan adalah dengan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran, dengan ketentuan apabila tingkat efisien < 1 maka terkategori tidak efisien, dan jika tingkat efisiensi ≥ 1 terkategori efisien (Wahyudi, agus ; 2024)

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran, diperoleh tingkat efisiensi ≥ 1 yang termasuk dalam kategori efisien. Kondisi ini menggambarkan bahwa program-program diatas mampu mencapai bahkan melampaui target kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat dan efektif.

Selanjutnya secara kuantitas, alokasi anggaran terbesar terserap pada urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp. 3.204.205.213,00,- diikuti oleh urusan pilihan perdagangan sebesar Rp. 8.404.177.039,00,-

E. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja yang disusun dimanfaatkan untuk hal – hal sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyusunan capaian kinerja Perangkat Daerah maupun penilaian kinerja individu
2. Sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan perencanaan selanjutnya
3. Secara berkala digunakan sebagai rujukan pimpinan unit kerja dalam mengevaluasi kinerja pegawai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat telah tercapai sesuai target bahkan ada beberapa sasaran yang mencapai kinerja diatas target yang ditetapkan.
2. Pencapaian sasaran kinerja program telah tercapai dengan tingkat efisiensi rata – rata efisien. Pencapaian target kinerja kegiatan telah tercapai rata – rata 100%, kecuali kegiatan yang bersifat penunjang operasional kantor seperti biaya langganan Listrik, telepon, internet dan air bersih.
3. Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2025 mengalami berbagai dinamika. Ada faktor yang mendukung namun ada faktor yang menghambat pencapaian kinerja. Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain dukungan regulasi, dukungan sumberdaya anggaran, perbaikan manajemen kinerja internal yang membuat garis koordinasi semakin efektif, hingga komitmen pimpinan perangkat daerah dalam memimpin dan membimbing tim sehingga bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan.
4. Selain faktor pendukung keberhasilan kinerja diatas, terdapat juga faktor penghambat atau tantangan dalam mencapai kinerja, baik internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain beberapa aparatur yang cukup mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi dalam organisasi maupun keterbatasan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal adalah sikap mental koperasi dan UKM yang belum terbuka dengan perubahan kondisi era digital, ketergantungan pada bantuan pemerintah yang masih tinggi hingga komitmen melaksanakan hasil pembinaan yang masih rendah.

Faktor eksternal yang menjadi penghambat selanjutnya antara lain Terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 tahun 2024 tentang usaha simpan pinjam, yang mengatur tentang koperasi simpan pinjam, yang mewajibkan koperasi Simpan Pinjam harus melakukan *self declair* yaitu pernyataan mandiri koperasi terkait dengan pilihan sistem usahanya yakni simpan pinjam terbuka atau tertutup. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan *self declare* ini adalah pelaksanaan perbaikan tata kelola bagi koperasi yang telah dilakukan verifikasi oleh mitra Kementrian Koperasi dan UKM dan diindikasikan sebagai koperasi terbuka dalam menjalankan usahanya, mengingat temuan dilapangan koperasi - koperasi tersebut bukanlah koperasi yang sistem usaha simpan pinjamnya terbuka, sehingga dalam penyelesaiannya diharuskan memperbaiki tata kelola sesuai UU 25 tahun 1992. Perbaikan tata kelola dimaksud menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, mengingat tidak semua koperasi bisa langsung menindaklanjuti perbaikan tata kelola tersebut.

B. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

1. Pelaksanaan Pembangunan Pasar Tematik Wisata Jelajah Danau Ranau Lumbok Seminung pada Tahun 2024 yang penyelesaiannya tidak tepat waktu dan harus di anggarkan pada APBDP Tahun 2025.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan Lumbok Seminung Resort yang didalam Kawasan tersebut terdapat aset Pasar Tematik Wisata Jelajah Danau Ranau Lumbok Seminung mengalami tumpang tindih tugas dan fungsi, sehingga menyulitkan optimalisasi pengelolaan dan berdampak terhadap efektifitas dan efisiensi pengelolaan Kawasan tersebut.
3. Kawasan Lumbok Seminung Resort direncanakan akan dikelola oleh pihak ketiga namun saat ini masih dalam proses pemilihan pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola Kawasan Lumbok Seminung Resort dan Penataan pemisahan aset Kawasan tersebut.

C. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Telah dilakukan penyelesaian pembayaran melampaui tahun anggaran sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
2. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset, maka Kawasan Lumbok Seminung Resort pengelolaannya dipindahkan ke Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata termasuk seluruh aset di dalamnya dengan mengoptimalkan UPT Sarana dan Prasarana Pariwisata.
3. Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penyelesaian teknis yang dihadapi

LAMPIRAN I

RENCANA AKSI TINGKAT TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
PERIODE 2023 - 2026
TAHUN 2025

NO	TUJUAN							SASARAN STRATEGIS							Nama Jabatan Penanggung Jawab
	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SAMPAI DENGAN				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SAMPAI DENGAN				
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Meningkatnya Kontribusi Subsektor Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pendapatan Perkapita	% Koperasi yang Sehat	Koperasi	34	34	34	34	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	% Koperasi yang Sehat	%	34%	34%	34%	34%	Kepala Dinas
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	%	39%	39%	39%	39%		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	%	39%	39%	39%	39%	Kepala Dinas
		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	%	9%	9%	9%	9%		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	%	9%	9%	9%	9%	Kepala Dinas
		PDRB Sektor Perdagangan	Milyar rupiah	1.530,40	1.530,40	1.530,40	1.530,40	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor perdagangan	Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar)	Milyar rupiah	1.530,40	1.530,40	1.530,40	1.530,40	Kepala Dinas

KEPALA DINAS
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I.
Pembina TK.I / IV.b
NIP.19770521 200501 1 003

LAMPIRAN II

RENCANA AKSI TINGKAT PROGRAM DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
PERIODE 2023 - 2026
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sakip OPD	Point	Trw 1 = 84,21	Trw 1 = Rp3.403.450.272,12	Sekretaris
						Trw 2 = 84,21	Trw 2 = Rp3.403.450.272,12	
						Trw 3 = 84,21	Trw 3 = Rp3.403.450.272,12	
						Trw 4 = 84,21	Trw 4 = Rp3.403.450.272,12	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	%	Trw 1 = 34%	Trw 1 = Rp68.792.000	Kabid Koperasi, UKM
						Trw 2 = 34%	Trw 2 = Rp68.792.000	
						Trw 3 = 34%	Trw 3 = Rp68.792.000	
						Trw 4 = 34%	Trw 4 = Rp68.792.000	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas manjerial koperasi	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	%	Trw 1 = 6%	Trw 1 = Rp47.474.000	Kabid Koperasi, UKM
						Trw 2 = 6%	Trw 2 = Rp47.474.000	
						Trw 3 = 6%	Trw 3 = Rp47.474.000	
						Trw 4 = 6%	Trw 4 = Rp47.474.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kualitas Produk UMKM	Persentase UMKM terfasilitasi	%	Trw 1 = 9%	Trw 1 = Rp318.533.900	Kabid Koperasi, UKM
						Trw 2 = 9%	Trw 2 = Rp318.533.900	
						Trw 3 = 9%	Trw 3 = Rp318.533.900	
						Trw 4 = 9%	Trw 4 = Rp318.533.900	

1 NO	2 SASARAN STRATEGIS	3 PROGRAM	4 SASARAN PROGRAM	5 INDIKATOR PROGRAM	6 SATUAN	7 Kinerja Per triwulan Akumulatif	8 Kinerja Per triwulan Akumulatif	9 Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
2	Meningkatnya Produk Domestik (PDRB) Sektor Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	%	Trw 1 = 60%	Trw 1 = Rp7.872.980.427	Kabid Pengelolaan & Pengembangan Pasar
						Trw 2 = 60%	Trw 2 = Rp7.872.980.427	
						Trw 3 = 60%	Trw 3 = Rp7.872.980.427	
						Trw 4 = 60%	Trw 4 = Rp7.872.980.427	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, dan Barang Penting	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	%	Trw 1 = 3%	Trw 1 = Rp55.707.100	Kabid Perdagangan
						Trw 2 = 3%	Trw 2 = Rp55.707.100	
						Trw 3 = 3%	Trw 3 = Rp55.707.100	
						Trw 4 = 3%	Trw 4 = Rp55.707.100	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen	% Alat UTTP tertera sah	%	Trw 1 = 9,40%	Trw 1 = Rp46.402.600	Kabid Perdagangan
						Trw 2 = 9,40%	Trw 2 = Rp46.402.600	
						Trw 3 = 9,40%	Trw 3 = Rp46.402.600	
						Trw 4 = 9,40%	Trw 4 = Rp46.402.600	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Penjualan Produk Koperasi dan UMKM	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	%	Trw 1 = 11%	Trw 1 = Rp26.073.000	Kabid Perdagangan
						Trw 2 = 11%	Trw 2 = Rp26.073.000	
						Trw 3 = 11%	Trw 3 = Rp26.073.000	
						Trw 4 = 11%	Trw 4 = Rp26.073.000	

KEPALA DINAS
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I.

Pembina TK.I / IV.b
NIP.19770521 200501 1 003

LAMPIRAN III

RENCANA AKSI TINGKAT KEGIATAN DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
PERIODE 2023 - 2026
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab	
						Target	Target		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Trw 1 = 11	Trw 1 = Rp32.715.400	Kassubag Umum dan Perencanaan	
						Trw 2 = 11	Trw 2 = Rp32.715.400		
						Trw 3 = 11	Trw 3 = Rp32.715.400		
						Trw 4 = 11	Trw 4 = Rp32.715.400		
				Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Dokumen	Trw 1 = 5		Kassubag Umum dan Perencanaan	
						Trw 2 = 5			
						Trw 3 = 5			
						Trw 4 = 5			
				Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Trw 1 = 10			Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 10			

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
					Dokumen	Trw 3 = 10		Umum dan Perencanaan
						Trw 4 = 10		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Trw 1 = 26	Trw 1 = Rp2.782.481.196	Kassubag Keuangan
						Trw 2 = 26	Trw 2 = Rp2.782.481.196	
						Trw 3 = 26	Trw 3 = Rp2.782.481.196	
						Trw 4 = 26	Trw 4 = Rp2.782.481.196	
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	Trw 1 = 1		Kassubag Keuangan
						Trw 2 = 1		
						Trw 3 = 1		
						Trw 4 = 1		
				Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan	Laporan	Trw 1 = 4		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
						Trw 2 = 4		Kassubag Keuangan
						Trw 3 = 4		
						Trw 4 = 4		
						Trw 1 = 1		Kassubag Keuangan
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	Trw 2 = 1		
						Trw 3 = 1		
						Trw 4 = 1		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp1.226.500	Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp1.226.500	
						Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp1.226.500	
						Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp1.226.500	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Orang	Trw 1 = 2	Trw 1 = Rp14.499.600	Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 2	Trw 2 = Rp14.499.600	
						Trw 3 = 2	Trw 3 = Rp14.499.600	
						Trw 4 = 2	Trw 4 = Rp14.499.600	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Trw 1 = 3	Trw 1 = Rp195.750.170	Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 3	Trw 2 = Rp195.750.170	
						Trw 3 = 3	Trw 3 = Rp195.750.170	
						Trw 4 = 3	Trw 4 = Rp195.750.170	
				Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan	Paket	Trw 1 = 2		Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 2		
						Trw 3 = 2		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
					Paket	Trw 4 = 2		
						Trw 1 = 2		
						Trw 2 = 2		
						Trw 3 = 2		
				Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan	Paket	Trw 4 = 2		Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 1 = 4		
						Trw 2 = 4		
						Trw 3 = 4		
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	Dokumen	Trw 4 = 4		Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 1 = 12		
						Trw 2 = 12		
				Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	Laporan			Kassubag Umum dan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
					Laporan	Trw 3 = 12		Umum dan Perencanaan
						Trw 4 = 12		Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 1 = 12		
						Trw 2 = 12		
						Trw 3 = 12		
						Trw 4 = 12		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp7.850.000	Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp7.850.000	
						Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp7.850.000	
						Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp7.850.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	Trw 1 = 12	Trw 1 = Rp184.895.500	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
						Trw 2 = 12	Trw 2 = Rp184.895.500	Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 3 = 12	Trw 3 = Rp184.895.500	
						Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp184.895.500	
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	Trw 1 = 12		Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 12		
						Trw 3 = 12		
						Trw 4 = 12		
				Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	Trw 1 = 12		Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 12		
						Trw 3 = 12		
						Trw 4 = 12		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	Trw 1 = 14	Trw 1 = Rp121.709.700	Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 14	Trw 2 = Rp121.709.700	
						Trw 3 = 14	Trw 3 = Rp121.709.700	
						Trw 4 = 14	Trw 4 = Rp121.709.700	
				Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	Trw 1 = 3		Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 3		
						Trw 3 = 3		
						Trw 4 = 3		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Trw 1 = 3		Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 3		
						Trw 3 = 3		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
						Trw 4 = 3		
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Pelayanan BLUD	Unit kerja	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp43.132.206,12	Kassubag TU UPTD
						Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp43.132.206,12	
						Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp43.132.206,12	
						Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp43.132.206,12	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Unit Usaha	Trw 1 = 58	Trw 1 = Rp68.792.000	
						Trw 2 = 58	Trw 2 = Rp68.792.000	
						Trw 3 = 58	Trw 3 = Rp68.792.000	
						Trw 4 = 58	Trw 4 = Rp68.792.000	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	Trw 1 = 30	Trw 1 = Rp47.474.000	Fungsional Pengawas
						Trw 2 = 30	Trw 2 = Rp47.474.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
						Trw 3 = 30	Trw 3 = Rp47.474.000	Pengawas Koperasi
						Trw 4 = 30	Trw 4 = Rp47.474.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Unit usaha	Trw 1 = 40	Trw 1 = Rp318.533.900	Fungsional Pengawas Koperasi
						Trw 2 = 40	Trw 2 = Rp318.533.900	
						Trw 3 = 40	Trw 3 = Rp318.533.900	
						Trw 4 = 40	Trw 4 = Rp318.533.900	
				Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit usaha	Trw 1 = 40		Fungsional Pengawas Koperasi
						Trw 2 = 40		
						Trw 3 = 40		
						Trw 4 = 40		
				Jumlah unit usaha yang telah menerima	Orang	Trw 1 = 500		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab	
						Target	Target		
1	2	3	4	6	7	8	10	12	
				Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro		Trw 2 = 500		Fungsional Pengawas Koperasi	
						Trw 3 = 500			
						Trw 4 = 500			
				Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	Orang	Trw 1 = 25			
						Trw 2 = 25			
						Trw 3 = 25			
						Trw 4 = 25			

2	Meningkatnya Produk Domestik (PDRB) Siktor Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Trw 1 = 2	Trw 1 = Rp7.300.848.727	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
						Trw 2 = 2	Trw 2 = Rp7.300.848.727	
						Trw 3 = 2	Trw 3 = Rp7.300.848.727	
						Trw 4 = 2	Trw 4 = Rp7.300.848.727	
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian	Dokumen	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp572.131.700	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
			Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	kepada pengelola sarana distribusi perdagangan		Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp572.131.700	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
						Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp572.131.700	
						Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp572.131.700	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Laporan	Trw 1 = 48	Trw 1 = Rp55.707.100	Fungsional Pengawas Mutu Produk
						Trw 2 = 48	Trw 2 = Rp55.707.100	
						Trw 3 = 48	Trw 3 = Rp55.707.100	
						Trw 4 = 48	Trw 4 = Rp55.707.100	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	unit	Trw 1 = 285	Trw 1 = Rp46.402.600	Fungsional Pengawas Kemetrolgian
						Trw 2 = 285	Trw 2 = Rp46.402.600	
						Trw 3 = 285	Trw 3 = Rp46.402.600	
						Trw 4 = 285	Trw 4 = Rp46.402.600	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	Orang	Trw 1 = 100		
						Trw 2 = 100		
						Trw 3 = 100		
						Trw 4 = 100		
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	Trw 1 = 5	Trw 1 = Rp26.073.000	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
						Trw 2 = 5	Trw 2 = Rp26.073.000	
						Trw 3 = 5	Trw 3 = Rp26.073.000	
						Trw 4 = 5	Trw 4 = Rp26.073.000	

KEPALA DINAS
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I.

Pembina TK.I / IV.b

NIP.19770521 200501 1 003

RENCANA AKSI TINGKAT SUB KEGIATAN DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
PERIODE 2023 - 2026
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
								Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Trw 1 = 11	Trw 1 = Rp25.261.500	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 = 11	Trw 2 = Rp25.261.500	
								Trw 3 = 11	Trw 3 = Rp25.261.500	
								Trw 4 = 11	Trw 4 = Rp25.261.500	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp1.209.700	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp1.209.700	
								Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp1.209.700	
								Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp1.209.700	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp1.188.800	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp1.188.800	
								Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp1.188.800	
								Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp1.188.800	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp1.147.400	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp1.147.400	
								Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp1.147.400	
								Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp1.147.400	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp1.427.500	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp1.427.500	
								Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp1.427.500	
								Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp1.427.500	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp1.273.000	Kassubag Umum dan Perencanaan
					Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp1.273.000	
					Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp1.273.000	
					Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp1.273.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Trw 1 = 12	Trw 1 = Rp1.207.500	Kassubag Umum dan Perencanaan
					Trw 2 = 12	Trw 2 = Rp1.207.500	
					Trw 3 = 12	Trw 3 = Rp1.207.500	
					Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp1.207.500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai	Orang	Trw 1 = 31	Trw 1 = Rp2.779.237.396	Kassubag Keuangan
					Trw 2 = 31	Trw 2 = Rp2.779.237.396	
					Trw 3 = 31	Trw 3 = Rp2.779.237.396	
					Trw 4 = 31	Trw 4 = Rp2.779.237.396	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp1.365.800	Kassubag Keuangan
					Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp1.365.800	
					Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp1.365.800	
					Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp1.365.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Laporan	Trw 1 = 4	Trw 1 = Rp668.000	Kassubag Keuangan
					Trw 2 = 4	Trw 2 = Rp668.000	
					Trw 3 = 4	Trw 3 = Rp668.000	
					Trw 4 = 4	Trw 4 = Rp668.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp1.210.000	Kassubag Keuangan	
				Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp1.210.000		
				Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp1.210.000		
				Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp1.210.000		

			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Trw 1 =	1	Trw 1 =	Rp1.226.500	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 =	1	Trw 2 =	Rp1.226.500	
								Trw 3 =	1	Trw 3 =	Rp1.226.500	
								Trw 4 =	1	Trw 4 =	Rp1.226.500	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Trw 1 =	2	Trw 1 =	Rp2.499.600	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 =	2	Trw 2 =	Rp2.499.600	
								Trw 3 =	2	Trw 3 =	Rp2.499.600	
								Trw 4 =	2	Trw 4 =	Rp2.499.600	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Trw 1 =	2	Trw 1 =	Rp12.000.000	
								Trw 2 =	2	Trw 2 =	Rp12.000.000	
								Trw 3 =	2	Trw 3 =	Rp12.000.000	
								Trw 4 =	2	Trw 4 =	Rp12.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Trw 1 =	3	Trw 1 =	Rp7.930.000	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 =	3	Trw 2 =	Rp7.930.000	
								Trw 3 =	3	Trw 3 =	Rp7.930.000	
								Trw 4 =	3	Trw 4 =	Rp7.930.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	Trw 1 =	1	Trw 1 =	Rp50.336.970	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 =	1	Trw 2 =	Rp50.336.970	
								Trw 3 =	1	Trw 3 =	Rp50.336.970	
								Trw 4 =	1	Trw 4 =	Rp50.336.970	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang cetak dan penggandaan	Paket	Trw 1 =	2	Trw 1 =	Rp36.054.200	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 =	2	Trw 2 =	Rp36.054.200	
								Trw 3 =	2	Trw 3 =	Rp36.054.200	
								Trw 4 =	2	Trw 4 =	Rp36.054.200	

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah langganan surat kabar	Dokumen	Trw 1 = 4	Trw 1 = Rp8.380.000	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 = 4	Trw 2 = Rp8.380.000	
								Trw 3 = 4	Trw 3 = Rp8.380.000	
								Trw 4 = 4	Trw 4 = Rp8.380.000	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Trw 1 = 12	Trw 1 = Rp5.850.000	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 = 12	Trw 2 = Rp5.850.000	
								Trw 3 = 12	Trw 3 = Rp5.850.000	
								Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp5.850.000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Trw 1 = 12	Trw 1 = Rp106.389.000	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 = 12	Trw 2 = Rp106.389.000	
								Trw 3 = 12	Trw 3 = Rp106.389.000	
								Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp106.389.000	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp7.850.000	
								Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp7.850.000	
								Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp7.850.000	
								Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp7.850.000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Laporan	Trw 1 = 12	Trw 1 = Rp2.420.000	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 = 12	Trw 2 = Rp2.420.000	
								Trw 3 = 12	Trw 3 = Rp2.420.000	
								Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp2.420.000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	Trw 1 = 12	Trw 1 = Rp125.984.300	Kassubag Umum dan Perencanaan
								Trw 2 = 12	Trw 2 = Rp125.984.300	
								Trw 3 = 12	Trw 3 = Rp125.984.300	
								Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp125.984.300	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sub Bidang Urusan	Laporan	Trw 1 = 12	Trw 1 = Rp56.491.200	Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 12	Trw 2 = Rp56.491.200	
						Trw 3 = 12	Trw 3 = Rp56.491.200	
						Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp56.491.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	Trw 1 = 10	Trw 1 = Rp79.375.000	Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 10	Trw 2 = Rp79.375.000	
						Trw 3 = 10	Trw 3 = Rp79.375.000	
						Trw 4 = 10	Trw 4 = Rp79.375.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	Trw 1 = 14	Trw 1 = Rp21.612.000	Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 14	Trw 2 = Rp21.612.000	
						Trw 3 = 14	Trw 3 = Rp21.612.000	
						Trw 4 = 14	Trw 4 = Rp21.612.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Trw 1 = 3	Trw 1 = Rp20.722.700	Kassubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 3	Trw 2 = Rp20.722.700	
						Trw 3 = 3	Trw 3 = Rp20.722.700	
						Trw 4 = 3	Trw 4 = Rp20.722.700	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit usaha	Trw 1 = 1	Trw 1 = 43.132.206,12	Kassubag TU UPTD	
					Trw 2 = 1	Trw 2 = 43.132.206,12		
					Trw 3 = 1	Trw 3 = 43.132.206,12		
					Trw 4 = 1	Trw 4 = 43.132.206,12		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketanggungan, serta akuntabilitas koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksanaan dan pengawasan	Unit usaha	Trw 1 = 58	Trw 1 = Rp68.792.000	Fungsionsl Pengawas
						Trw 2 = 58	Trw 2 = Rp68.792.000	
						Trw 3 = 58	Trw 3 = Rp68.792.000	

		Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		kewenangan kabupaten/kota		Trw 4 = 58	Trw 4 = Rp68.792.000	Koperasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	Trw 1 = 30	Trw 1 = Rp47.474.000	Fungsional Pengawas Koperasi
						Trw 2 = 30	Trw 2 = Rp47.474.000	
						Trw 3 = 30	Trw 3 = Rp47.474.000	
						Trw 4 = 30	Trw 4 = Rp47.474.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Unit usaha	Trw 1 = 40	Trw 1 = Rp54.577.500	Fungsional Pengawas Koperasi
						Trw 2 = 40	Trw 2 = Rp54.577.500	
						Trw 3 = 40	Trw 3 = Rp54.577.500	
						Trw 4 = 40	Trw 4 = Rp54.577.500	
		Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	Unit usaha	Trw 1 = 500	Trw 1 = Rp192.152.000	Fungsional Pengawas Koperasi
						Trw 2 = 500	Trw 2 = Rp192.152.000	
						Trw 3 = 500	Trw 3 = Rp192.152.000	
						Trw 4 = 500	Trw 4 = Rp192.152.000	
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	Unit usaha	Trw 1 = 20	Trw 1 = Rp39.030.000	Fungsional Pengawas Koperasi
						Trw 2 = 20	Trw 2 = Rp39.030.000	
						Trw 3 = 20	Trw 3 = Rp39.030.000	
						Trw 4 = 20	Trw 4 = Rp39.030.000	

		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	Orang	Trw 1 = 25	Trw 1 = Rp32.774.400	Fungsional Pengawas Koperasi
						Trw 2 = 25	Trw 2 = Rp32.774.400	
						Trw 3 = 25	Trw 3 = Rp32.774.400	
						Trw 4 = 25	Trw 4 = Rp32.774.400	

2	Meningkatnya Produk Domestik (PDRB) SIKTOR Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Trw 1 = 2	Trw 1 = Rp7.300.848.727	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
				Trw 2 = 2	Trw 2 = Rp7.300.848.727					
				Trw 3 = 2	Trw 3 = Rp7.300.848.727					
				Trw 4 = 2	Trw 4 = Rp7.300.848.727					
				Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Dokumen	Trw 1 = 1	Trw 1 = Rp572.131.700	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
								Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp572.131.700	
								Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp572.131.700	
								Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp572.131.700	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Laporan	Trw 1 = 48	Trw 1 = Rp55.707.100	Fungsional Pengawas Mutu Produk
								Trw 2 = 48	Trw 2 = Rp55.707.100	
								Trw 3 = 48	Trw 3 = Rp55.707.100	
								Trw 4 = 48	Trw 4 = Rp55.707.100	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	Unit	Trw 1 = 285	Trw 1 = Rp28.355.600	Fungsional Pengawas Kemetrologian
								Trw 2 = 285	Trw 2 = Rp28.355.600	
								Trw 3 = 285	Trw 3 = Rp28.355.600	
								Trw 4 = 285	Trw 4 = Rp28.355.600	
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya pembinaan pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	Unit	Trw 1 = 100	Trw 1 = Rp18.047.000	Fungsional Pengawas Kemetrologian
								Trw 2 = 100	Trw 2 = Rp18.047.000	
								Trw 3 = 100	Trw 3 = Rp18.047.000	
								Trw 4 = 100	Trw 4 = Rp18.047.000	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya akses penggunaan produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	Trw 1 = 5	Trw 1 = Rp26.073.000	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
								Trw 2 = 5	Trw 2 = Rp26.073.000	

					perencanaan dan jasa akomodasi	akomodasi	Unitas	Trw 3 = 5	Trw 3 = Rp26.073.000	Perdagangan dan
								Trw 4 = 5	Trw 4 = Rp26.073.000	

KEPALA DINAS
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I.

Pembina TK.I / IV.b
NIP.19770521 200501 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TRI UMARYANI, S.P, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **PAROSIL MABSUS**

Jabatan : Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



PAROSIL MABSUS

Pihak Pertama,



TRI UMARYANI, S.P, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19751229 199902 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TINGKAT
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Sehat	34%
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	30%
		Persentase Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	9%
2.	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	1.540,30 (milyar rupiah)

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan : Daerah Kabupaten/Kota	3,707,453,300	APBD
2 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi :	41,643,000	APBD
3 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian :	47.474.000	APBD
4 Program Pemberdayaan Usaha Menengah : Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	425.031.900	APBD
5 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan :	664.583.080	APBD
6 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan : Pokok dan Barang Penting :	99.624.800	APBD
7 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen :	92.049.800	APBD
8 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk : Dalam Negeri	45.673.000	APBD

Jumlah Anggaran

:

5.123.532.880

Liwa, 28 Februari 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,



PAROSIL MABSUS

KEPALA DINAS
KOPERASI UKM DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUN BARAT,



TRI UMARYANI, S.P, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19751229 1999 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MIA MIRANDA, S.T.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **TRI UMARYANI, S.P, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

TRI UMARYANI, S.P, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19751229 199902 2 001

Pihak Pertama,

MIA MIRANDA, S.T.

Pembina TK. I
NIP. 19720905 200212 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TINGKAT
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sakip OPD	84,21 poin

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :	3.707.453.300	APBD
Jumlah Anggaran	3.707.453.300	

Liwa, 28 Februari 2025

**KEPALA DINAS
KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**



TRI UMARYANI, S.P, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19751229 199902 2 001

SEKRETARIS DINAS,

MIA MIRANDA, S.T.

Pembina TK. I
NIP.19720905 200212 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KUSMAWATI, S.IP.**

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **MIA MIRANDA, S.T.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



MIA MIRANDA, S.T.

Pembina TK. I
NIP. 19720905 200212 2 004

Pihak Pertama,



KUSMAWATI, S.IP.

Penata TK. I
NIP. 19840108 200212 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/bulan
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Laporan
3	Tersedianya laporan bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 laporan
4	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN :	2.965.060.400	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD :	3.025.000	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestan SKPD :	1.210.000	APBD
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran :	2.420.000	APBD

Jumlah Anggaran

2.971.715.400

Liwa, 28 Februari 2025

SEKRETARIS DINAS



MIA MIRANDA, S.T.

Pembina TK. I

NIP.19720905 200212 2 004

KASUBBAG KEUANGAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kusmawati', is written over the text 'KASUBBAG KEUANGAN'.

KUSMAWATI, S.IP.

Penata TK. I

NIP. 19840108 200212 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITRA ALFARISI, S.P.**

Jabatan : Kasubbag Umum dan Perencanaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **MIA MIRANDA, S.T.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



MIA MIRANDA, S.T.
Pembina TK. I
NIP. 19720905 200212 2 004

Pihak Pertama,



FITRA ALFARISI, S.P.
Penata Muda TK.I
NIP. 19860607 201903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen
4	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan
8	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 dokumen
9	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	umlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen
10	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang

11	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 paket
12	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket
13	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket
14	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	4 dokumen
15	Terlaksananya Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	12 laporan
16	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
17	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan
20	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
21	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit
22	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	14 unit
23	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit

	Sub Kegiatan	:	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	:	21.779.000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	:	2.545.000	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	:	2.419.700	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	:	2.420.000	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	:	2.420.000	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	:	2.420.000	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	2.420.000	APBD
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	:	2.000.000	APBD
9	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	:	4.999.800	APBD
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	:	12.000.000	APBD
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	:	2.930.000	APBD
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	27.147.000	APBD
13	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	:	47.701.200	APBD

15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	:	10.385.000	APBD
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	:	5.850.000	APBD
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	:	186.518.000	APBD
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	:	7.850.000	APBD
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	:	2.420.000	APBD
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	:	125.984.300	APBD
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	:	72.691.200	APBD
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	:	79.375.000	APBD
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	:	14.112.000	APBD
24	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	:	61.672.700	APBD
Jumlah Anggaran			700.059.900	

Liwa, 28 Februari 2025



SEKRETARIS DINAS

MIA MIRANDA,S.T.

Pembina TK. I

NIP.19720905 200212 2 004

KASUBBAG UMUM DAN PERENCANAAN



FITRA ALFARISI, S.P.

Penata Muda TK.I

NIP. 19860607 201903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SANWANI, SE.**

Jabatan : Kasubag Tata Usaha UPTD PP-KUKM pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **MIA MIRANDA, S.T.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



MIA MIRANDA, S.T.
Pembina TK.I
NIP.19720905 202212 2 004

Pihak Pertama,



SANWANI, SE.
Penata Muda Tk.I
NIP. 19740715 200906 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang pelayanan	1 unit kerja

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD :	35.678.000	APBD
Jumlah Anggaran	35.678.000	

Liwa, 28 Februari 2025

SEKRETARIS DINAS



MIA MIRANDA,S.T.

Pembina TK. I

NIP. 19860607 201903 1 002

KASUBBAG TU UPTD PP-KUKM

SANWANI, SE.

Penata Muda TK. I

NIP. 19740715 200906 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROHANIAH, S.E.**

Jabatan : Staf pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **KUSMAWATI, S.IP.**

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

KUSMAWATI, S.IP.

Penata

NIP. 19840108 200212 2 002

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Pertama,

ROHANIAH, S.E.

Penata Muda TK. I

NIP. 19890626 201903 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya informasi pelaporan keuangan yang akuntabel	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tepat Waktu	12 Laporan
2	Terlaksananya transaksi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Jumah Pelaksanaan Pengajuan mekanisme GU tepat waktu	24 kali
3	Terlaksananya pelaporan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan terentry di Aplikasi SIPD tepat waktu	12 laporan

Liwa, 28 Februari 2025

KASUBBAG KEUANGAN



KUSMAWATI, S.IP.

Penata

NIP. 19840108 200212 2 002

STAF

ROHANIAH, S.E.

Penata Muda TK. I

NIP. 19890626 201903 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESY FERA ARIYANTI, S.E.**

Jabatan : Staf pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **FITRA ALFARISI, S.P.**

Jabatan : Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



FITRA ALFARISI, S.P.

Penata Muda TK.I

NIP. 19860607 201903 1 002

Pihak Pertama,

DESY FERA ARIYANTI

Penata Muda

NIP. 19950611 202203 2 006

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun Rencana Aksi Kegiatan tahun 2025	Jumlah dokumen rencana aksi kegiatan tahun 2025	1 dokumen
2	Menyusun dan Menyiapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Jumlah dokumen perjanjian kinerja tahun 2025	1 dokumen
3	Menyusun dan Menyiapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	Jumlah dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2025	1 dokumen
4	Menyusun Dokumen Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025	Jumlah dokumen evaluasi rencana aksi tahun 2025	4 dokumen
5	Membantu menyiapkan data dukung perencanaan dan evaluasi	Jumlah dokumen pendukung perencanaan dan evaluasi	11 dokumen
6	Melaksanakan pengentrian dokumen evaluasi kinerja pada aplikasi e sakti berkibar	Jumlah pelaksanaan pengentrian dokumen evaluasi kinerja pada aplikasi sakti berkibar	4 kali
7	Melaksanakan pengentrian dokumen perencanaan pada aplikasi SIPD RI	Jumlah pelaksanaan pengentrian dokumen perencanaan pada aplikasi SIPD RI	3 kali
8	Terhimpunnya data pendukung penyusunan RKBMD	Jumlah data pendukung penyusunan RKBMD	1 dokumen
9	Terhimpunnya data pendukung pencatatan Aset	Jumlah triwulan rekonsiliasi pencatatan aset	4 triwulan

Liwa, 28 Februari 2025

KASUBBAG UMUM DAN PERENCANAAN



FITRA ALFARISI, S.P.
Penata Muda TK.I
NIP. 19860607 201903 1 002

STAF

DESY FERA ARIYANTI, S.E.
Penata Muda
NIP. 19950611 202203 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUL YATI, S.E**

Jabatan : Staf pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **FITRA ALFARISI, S.P.**

Jabatan : Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



FITRA ALFARISI, S. P.
Penata Muda TK.I
NIP. 19860607 201903 1 002

Pihak Pertama,

YUL YATI, S.E
Penata
NIP. 19800601 201001 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya rapat evaluasi kinerja pegawai	Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi kinerja pegawai	4 kali
2	Terlaksananya rekapitulasi presensi pegawai	Jumlah rekapitulasi presensi pegawai	12 dokumen
3	Terlaksananya inventarisasi tamu dinas	Jumlah dokumen kunjungan tamu	12 dokumen
4	Terlaksananya inventarisasi tagihan langganan listrik, air & internet kantor	Jumlah dokumen tagihan langganan listrik, air dan internet	12 dokumen

Liwa, 28 Februari 2025

KASUBBAG UMUM DAN PERENCANAAN



FITRA ALFARISI, S.P.

Penata Muda TK.I

NIP. 19860607 201903 1 002

STAF

YUL YATI, S.E

Penata

NIP. 19800601 201001 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURLIANA, S.I.P.**

Jabatan : Plt. Kabid Koperasi UKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **TRI UMARYANI, S.P, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

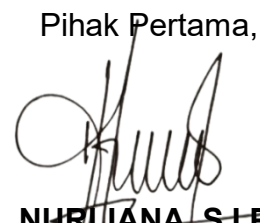
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



TRI UMARYANI, S.P, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19751229 199902 2 001

Pihak Pertama,


NURLIANA, S.I.P.
Penata TK.I
NIP. 19820608 200212 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	35%
2	Meningkatnya kualitas manjerial koperasi	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	6%
3	Meningkatnya Kualitas Produk UMKM	Persentase UMKM terfasilitasi	9%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI :	41.643.000	APBD
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN :	47.474.000	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM) :	425.031.900	APBD
	Jumlah Anggaran	514.148.900	

LIWA, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



TRI UMARYANI, S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19751229 199902 2 001

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM

NURLIANA, S.I.P.

Penata TK.I

NIP. 19820608 200212 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SOLMI, S.Sos.**

Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NURLIANA, S.I.P.**

Jabatan : Plt. Kabid Koperasi UKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten
Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Liwa, 28 Februari



Pihak Kedua,

NURLIANA, S.I.P.

Penata TK.I

NIP. 19820608 200212 2 001

2025 Pihak Pertama,

SOLMI, S.Sos.

Penata TK.I

NIP. 19770628 200801 2 008

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	29 Unit Usaha
2	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	500 Unit usaha
3	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	25 orang

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro :	42.140.000	APBD
2 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro :	232438.500	APBD
3 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan :	48.971.400	APBD
Jumlah Anggaran	323.549,900	

Liwa, 28 Februari 2025

Plt. KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM


NURLIANA, S.I.P
Penata TK.I
NIP.19820608 200212 2 001

PENGAWAS KOPERASI AHLI
MUDA


SOLMI, S.Sos.
Penata TK. I/III d
NIP. 19770628 200801 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURLIANA, S.I.P.**
Jabatan : Fungsional Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **MIA MIRANDA. S.T.**
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,




MIA MIRANDA, S.T.
Pembina TK. I

NIP.19720905 200212 2 004

Liwa, 28 Februari 2025
Pihak Pertama



NURLIANA,
Penata TK.I

NIP. 19820608 200212 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2024

NO.	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026	Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2026	1 dokumen
2	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025	Jumlah dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025	1 dokumen
3	Tersedianya Laporan Legitimasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Legitimasi Perencanaan Pembangunan	1 laporan
4	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025	Jumlah Rencana Kerja Anggaran Perubahan	1 dokumen
5	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026	1 laporan
6	Tersedianya dokumen Cascading dan Crosscutting Kinerja Organisasi	Jumlah Laporan Penyusunan Cascading dan Crosscutting Kinerja Organisasi	1 laporan
7	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2025	Jumlah Laporan Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja untuk Pertanggung Jawaban Bupati Tahun 2025	1 laporan
8	Terlaksananya Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Tahun 2026	Jumlah Dokumen KAK Tahun 2026	4 Dokumen
9	Terlaksananya Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025	1 dokumen

10	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025	Jumlah Laporan LPPD Tahun 2025	1 laporan
11	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 dokumen

Liwa, 28 Februari 2024

SEKRETARIS DINAS



MIA MIRANDA, S.T.

Pembina TK. I

NIP.19720905 200212 2 004

PERENCANA AHLI MUDA

NURLIANA, S.I.P

Penata TK.I

NIP.19820608 200212 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURYADI, S.E.**

Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NURLIANA, S.I.P.**

Jabatan : Plt. Kabid Koperasi UKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten
Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Liwa, 28 Februari

2025 Pihak Pertama,



Pihak Kedua,

NURLIANA, S.I.P.

Penata TK.I

NIP. 19820608 200212 2 001

SURYADI, S.E.

Penata TK.I

NIP. 19751003 201001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	20 orang

	Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi :	47.474.000	APBD
Jumlah Anggaran	47.474.000	

Plt KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM



NURLIANA, S.I.P
Penata TK.I
NIP.19820608 200212 2 001

Liwa, 28 Februari 2025

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA



SURYADI, S.E.
Penata TK. I/III d
NIP. 19751003 201001 1001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. INDAWAN, S.I.P.**

Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NURLIANA, S.I.P.**

Jabatan : Plt. Kabid Koperasi UKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten
Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,




NURLIANA, S.I.P.

Penata TK.I

NIP. 19820608 200212 2 001

Pihak Pertama,



M. INDAWAN, S.I.P.

Penata TK.I

NIP. 19690207 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	58 Unit Usaha

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengeawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota :	41.643.000	APBD

Jumlah Anggaran 41.643,000

Liwa, 28 Februari 2025

Pit. KERALA BIDANG KOPERASI DAN UKM



NURLIANA, S.I.P.

Penata TK.I

NIP.19820608 200212 2 001

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

M. INDAWAN, S.I.P.

Penata TK. I/III d

NIP. 19690207 199303 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUDHY PRIMANDHA, S.IP., MM.**

Jabatan : Kepala UPTD PP-KUKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NURLIANA, S.I.P.**

Jabatan : Plt. Kabid Koperasi UKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

NURLIANA, S.I.P.

Penata TK.I

NIP. 19820608 200212 2 001

Pihak Pertama,

YUDHI PRIMANDHA, S.IP., MM.

Pembina

NIP. 19780822 200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT
PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

A	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring dana bergulir	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	40 unit usaha

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	101.482.000	APBD

Liwa, 28 Februari 2025

Plt. KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM

KEPALA UPTD PP-KUMKM



NURLIANA, S.I.P

Penata TK.I

NIP.19820608 200212 2 001

YUDHI PRIMANDHA, S.I.P., MM.

Pembina

NIP. 19780822 200212 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMAD FAIZAL, A.Md.**

Jabatan : Staf Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NURLIANA, S.I.P.**

Jabatan : Plt. Kabid Koperasi dan UKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Pertama,

RAHMAD FAIZAL, A.Md.

Pengatur

NIP. 19950907 202203 1 007

Pihak Kedua,



NURLIANA, S.I.P.

Penata TK.I

NIP. 19820608 200212 2 001

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya data pendukung penyusunan KAK Kegiatan Pelatihan Koperasi	Jumlah dokumen KAK	1 dokumen
2	Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan koperasi	Jumlah Pelaksanaan Rapat	4 kali
3	Tersedianya data pendukung kegiatan Pembinaan dan Pengembangan UMKM	Jumlah Data UMKM terbina dan terfasilitasi	1 dokumen
4	Terlaksananya dokumen evaluasi kegiatan sektor koperasi	Jumlah data pendukung evaluasi	1 dokumen
5	Tersedianya dokumen KAK Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah dokumen KAK	1 dokumen
6	Tersedianya data bahan penyusunan evaluasi kegiatan di sektor UMKM	Jumlah data pendukung evaluasi	1 dokumen
7	Tersusunnya data Keragaan Koperasi yang valid	Jumlah dokumen data keragaan koperasi	1 dokumen

Liwa, 28 Februari 2025

Plt. KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM



NURLIANA, S.I.P

Penata TK.I

NIP.19820608 200212 2 001

STAF

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rahmad Faizal'.

RAHMAD FAIZAL, A.Md.

Pengatur

NIP. 19950907 202203 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERIYANTO, S.Kom.**

Jabatan : Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **TRI UMARYANI, S.P, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



TRI UMARYANI, S.P, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19751229 199902 2 001

Pihak Pertama ,

HERIYANTO, S.Kom.
Pembina/ IV.a
NIP. 19800203 200804 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah

: DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

Tahun Anggaran

: 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, dan Barang Penting	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	3%
2	Meningkatnya Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen	% Alat UTTP tertera sah	9,40%
3	Meningkatnya Penjualan Produk Koperasi dan UMKM	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	11%

	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING :	99,624,800	APBD
2 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN :	92.049.800	APBD
3 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI :	45.673.000	APBD
Jumlah Anggaran	237.347.600	

KEPALA DINAS
KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


TRI UMARYANI, S.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751229 199902 2 001

Liwa, 28 Februari 2025
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN


HERIYANTO, S.Kom.
Pembina/ IV.a
NIP. 19800203 200804 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESI HAIRONI, S.E.**

Jabatan : Penjamin Mutu Produk Ahli Muda pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **HERIYANTO, S.Kom.**

Jabatan : Kabid Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

HERIYANTO, S.Kom.

Pembina/ IV.a

NIP. 19800203 200804 1 001

Pihak Pertama,

DESI HAIRONI, S.E.

Penata

NIP. 19761112 201001 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	48 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting : pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem perdagangan	99.624.800	APBD

Jumlah Anggaran 99.624.800

Liwa, 28 Februari 2025

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN



HERIYANTO, S.Kom.

Pembina/ IV.a

NIP. 19800203 200804 1 004

PENJAMIN MUTU PRODUK AHLI MUDA

DESI HAIRONI, S.E.

Penata

NIP. 19761112 201001 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MASDARIA, S.H.**

Jabatan : Pengawas Kemetrolagian Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **HERIYANTO, S.Kom.**

Jabatan : Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten
Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



HERIYANTO, S.Kom.

Pembina/ IV.a

NIP. 19800203 200804 1 001

Pihak Pertama,



MASDARIA, S.H.

Penata TK.I

NIP. 19750830 200902 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TINGKAT
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah Alat ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	354 unit
2	Terlaksananya pembinaan pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	100 orang

	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera-Tera Ulang	66.269.800	APBD
2. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	25.780.000	
Jumlah Anggaran	92.049.800	

Liwa, 28 Februari 2025

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN



HERIYANTO, S.Kom.

Pembina/ IV.a

NIP. 19800203 200804 1 004

PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI MUDA



MASDARIA, S.H.

Penata TK. I

NIP. 19750830 200902 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAMADHANI, S.A.N.**

Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **HERIYANTO, S.Kom.**

Jabatan : Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

HERIYANTO, S.Kom.

Pembina/ IV.a

NIP. 19800203 200804 1 001

Pihak Pertama,

RAMADHANI, S.A.N.

Penata

NIP. 19870422 201422 1 001

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT
PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses penggunaan produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran Produk Dalam negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Market place, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	18 UMKM

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemasaran dan peningkatan Penggunaa		
Produk Dalam Negeri Tingkat kabupaten/Kota	:	45.673.000
Jumlah Anggaran		45,673,000

Liwa, 28 Februari 2025

KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN



HERIYANTO, S.Kom.
Pembina/ IV.a
NIP. 19800203 200804 1 004

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA



RAMADHANI, S.A.N
Penata
NIP. 19870422 201422 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LENDRA JAYA, A.Md**

Jabatan : Staf pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **HERIYANTO, S.Kom.**

Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025
Pihak Pertama,

LENDRA JAYA, A.Md

Penata Muda

NIP. 19790116 201101 1 002

Pihak Kedua,

HERIYANTO, S.Kom.

Pembina/ IV.a

NIP. 19800203 200804 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TINGKAT
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya tera dan tera ulang alat UTTP	Jumlah Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP	36 kali
2	Tersedianya data hasil pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP	Jumlah laporan hasil tera dan tera ulang Alat UTTP	36 Laporan

Liwa, 28 Februari 2025

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN



HERIYANTO, S.Kom.

Pembina/ IV.a

NIP. 19800203 200804 1 004

STAF

LENDRA JAYA, A.Md

Penata Muda

NIP. 19790116 201001 1 022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SIGIT SAMSENSO, SE.**

Jabatan : Staf Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **HERIYANTO, S.Kom.**

Jabatan : Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



HERIYANTO, S.Kom.

Pembina/ IV.a
NIP. 19800203 200804 1 001

Pihak Pertama,

SIGIT SAMSENSO, SE.

Penata
NIP. 19750307 200604 1 011

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya data UTTP	Jumlah data UTTP yang valid	1 dokumen
2	Tersedianya data pengawasan Metrologi	Jumlah dokumen pengawasan Metrologi	1 dokumen
3	Terlaksanya Pengawasan Metrologi	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Metrologi	12 kali

Liwa, 20 Februari 2025

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN


HERIYANTO, S.Kom.

Pembina/ IV.a
NIP. 19800203 200804 1 004

STAF


SIGIT SAMSENO, SE.

Penata
NIP. 19750307 200604 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGIL MUHARAM, ST.**

Jabatan : Staf Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **HERIYANTO, S.Kom.**

Jabatan : Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

HERIYANTO, S.Kom.

Pembina/ IV.a

NIP. 19800203 200804 1 001

Pihak Pertama,

AGIL MUHARAM, ST.

Penata Muda

NIP. 19880816 202203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya data harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah dokumen data yang valid	48 laporan
2	Tersedianya data pendukung pertanggung jawaban sub kegiatanPemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem perdagangan	Jumlah dokumen pertanggung jawaban	1 dokumen

Liwa, 20 Februari 2025

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN



HERIYANTO, S.Kom.

Pembina/ IV.a
NIP. 19800203 200804 1 004

STAF



AGIL MUHARAM, ST.

Penata Muda
NIP. 19880816 202203 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SALAFUDIN, M.I.P.**

Jabatan : Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **TRI UMARYANI, S.P, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025
Pihak Pertama,

SALAFUDIN, M.I.P.

Pembina

NIP. 19740521 200212 1 002

Pihak Kedua,



TRI UMARYANI, S.P, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19751229 199902 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Persentase los, kios, dan ruko yang direvitalisasi	60%

		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	664.583.080	APBD
Jumlah Anggaran		664.583.080	

Liwa, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


TRI UMARYANI, S.P., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19751229 199902 2 001



SALAFUDIN, M.I.P.

Pembina
NIP. 19740521 200212 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NAZIR, S.E.**

Jabatan : Penuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **SALAFUDIN, M.I.P.**

Jabatan : Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



SALAFUDIN, M.I.P.

Pembina

NIP. 19740521 200212 1 002

Pihak Pertama,

NAZIR, S.E.

Penata TK.I

NIP. 19731116 200604 1 010

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen

Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1. Pembinaan dan Pengendalian
Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan :

332.836.200

APBD

Jumlah Anggaran

332.836.200

Liwa, 28 Februari 2025

**KEPALA BIDANG PENGLOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PASAR**



SALAFUDIN, M.I.P.

Pembina

NIP. 19740521 200212 1 002

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NAZIR, S.E.

Penata T.K.I

NIP. 19731116 200604 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIRMAN, S.H.**

Jabatan : Penuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **SALAFUDIN, M.I.P.**

Jabatan : Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



SALAFUDIN, M.I.P.

Pembina

NIP. 19740521 200212 1 002

Pihak Pertama,

WIRMAN, S.H.

Penata

NIP. 19810707 200801 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TINGKAT
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Ketertiban dan Pengamanan Pedagang	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Pedagang, tempat parkir dan jalan di lingkungan pasar	12 kali

**KEPALA BIDANG PENGLOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PASAR**



SALAFUDIN, M.I.P.

Pembina

NIP. 19740521 200212 1 002

Liwa, 28 Februari 2025
**PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
AHLI MUDA**

WIRMAN, S.H.

Penata TK.I

NIP. 19810707 200801 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALI AKBAR, S.I.P.**

Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **SALAFUDIN, M.I.P.**

Jabatan : Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



SALAFUDIN, M.I.P.

Pembina

NIP. 19740521 200212 1 002

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Pertama,

ALI AKBAR, S.I.P.

Penata

NIP. 19721107 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT
PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen KAK Pengadaan Barang/Jasa	4 dokumen
2	Tersedianya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen HPS	24 dokumen

Liwa, 28 Februari 2025

KEPALA BIDANG PENGLOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PASAR



SALAFUDIN, M.I.P.

Pembina

NIP. 19740521 200212 1 002

PENGELOLA PENGADAAN BARANG
DAN JASA

ALI AKBAR, S.I.P.

Penata TK.I

NIP. 19721107 200701 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MIFTAHUL KHOIRI, S.E.**

Jabatan : Staf pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **SALAFUDIN, M.I.P.**

Jabatan : Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



SALAFUDIN, M.I.P.
Pembina

NIP. 19740521 200212 1 002

Pihak Pertama,



MIFTAHUL KHOIRI, S.E.
Penata Muda
NIP. 19950609 201903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya data kerangka acuan kerja	Jumlah KAK Sub Kegiatan	3 Dokumen
2	Tersusunnya laporan Kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan	3 Laporan
3	Tersedianya Administrasi Kegiatan Bidang	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi	12 Bulan
4	Terlaksananya pembayaran gaji pegawai	Jumlah Pembayaran gaji pegawai	30 orang

Liwa, 28 Februari 2025

KEPALA BIDANG PASAR



SALAFUDIN, M.I.P.

Pembina

NIP. 19740521 200212 1 002

STAF

MIFTAHUL KHOIRI, S.E.

Penata Muda TK.I

NIP. 19950609 201903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERNA UTAMI, S.E.**

Jabatan : Kepala UPT PLUT pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NURLIANA, S.I.P.**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi UKM dan
Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



NURLIANA, S.I.P
Penata TK. I

NIP. 19820608 200212 2 001

Pihak Pertama,



ERNA UTAMI, S.E.

Penata Muda TK. I

NIP. 19810609 200902 2 005

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

N O	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Jumlah dan Wirausaha yang didata	Jumlah UMKM yang terdata di UPTD PLUT KUMKM 2024 (by name by NIK)	2500 Unit usaha
2	Terfasilitasi Koperasi UMKM dan Wirausaha yang dilayani	Jumlah unit usaha Koperasi UMKM dan Wirausaha yang dilayani	200 Unit usaha
3	Terfasilitasi Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi memperoleh perizinan	Jumlah unit usaha Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi memperoleh perizinan	200 Unit usaha
4	Terfasilitasi Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi memperoleh akses pemasaran	Jumlah unit usaha Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi memperoleh akses pemasaran	250 Unit usaha
5	Terfasilitasi Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi memperoleh pembiayaan formal	Jumlah unit usaha Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi memperoleh pembiayaan formal	125 Unit usaha
6	Terfasilitasi Koperasi UMKM dan Wirausaha yang bermitra dengan Usaha Menengah / Usaha Besar	Jumlah unit usaha Koperasi UMKM dan Wirausaha yang bermitra dengan Usaha Menengah / Usaha Besar	125 Unit usaha
7	Terfasilitasi Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi meningkat omsetnya	Jumlah unit usaha Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi meningkat omsetnya	125 Unit usaha
8	Tersedianya Layanan PLUT	Jumlah Layanan PLUT	10 Layanan
9	Terlaksananya Inkubasi Bisnis	Jumlah UMKM yang diinkubasi	5 Tenant

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM



NURLIANA, S.I.P.

Pembina

NIP.19820608 200212 2 001

Liwa, 28 Februari 2025
KEPALA UPTD PLUT KUMKM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erna Utami', is written over the text.

ERNA UTAMI, S.E.

Penata Muda TK.I

NIP. 19810609 200902 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGIL MUHARAM, ST.**

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian UPT PLUT Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **ERNA UTAMI, S.E.**

Jabatan : Kepala UPT PLUT pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,



ERNA UTAMI, S.E.

Penata Muda TK.I

NIP. 19810609 200902 2 005

Pihak Pertama,

AGIL MUHARAM, ST.

Penata Muda

NIP. 19880816 202203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat pada UPT PLUT	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
2	Terlaksananya Administrasi Pencatatan dan Registrasi Aset UPT PLUT	Jumlah laporan pencatatan asset	12 laporan
3	Terlaksananya Administrasi dan Pencatatan Penggunaan Gedung PLUT	Jumlah laporan Penggunaan gedung PLUT	12 laporan
4	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kantor PLUT	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan gedung plut	12 bulan
5	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor PLUT	Jumlah Bulan pemeliharaan gedung PLUT	12 bulan
6	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian UPT PLUT	Jumlah kelengkapan administrasi pegawai	7 dokumen

Liwa, 28 Februari 2025

KEPALA UPT PLUT



ERNA UTAMI, S.E.
Penata Muda TK.I
NIP. 19810609 200902 2 005

STAF



AGIL MUHARAM, ST.
Penata Muda
NIP. 19880816 202203 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I.**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **PAROSIL MABSUS**

Jabatan : Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,



PAROSIL MABSUS

Pihak Pertama,

SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I

Pembina TK.I

NIP. 19770521 200501 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Sehat	34%
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	30%
		Persentase Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	9%
2.	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	1.540,30 (milyar rupiah)

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :	3.606.457.276,12	APBD
2 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi :	68.792.000	APBD
3 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian :	47.474.000	APBD
4 Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) :	318.533.900	APBD
5 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan :	7.872.980.427	APBD
6 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting :	55.707.100	APBD
7 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen :	46.402.600	APBD
8 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri :	26.073.000	APBD

Jumlah Anggaran

:

12.042.420.303,12

Liwa, 30 Oktober 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,



PAROSIL MABSUS

**KEPALA DINAS
KOPERASI UKM DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**

SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I

Pembina TK.I
NIP. 19770521 200501 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI HARTATI, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,



SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I

Pembina TK.I

NIP. 19770521 200501 1 003

Pihak Pertama,

SRI HARTATI, S.Sos., M.M.

Pembina TK.I

NIP. 19710929 199903 2 010

**PERUBAHAN PERJANJIAN
KINERJA TINGKAT PERANGKAT
DAERAH**

**Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sakip OPD	84,21 poin

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :	3.606.457.276,12	APBD
	Jumlah Anggaran	3.606.457.276,12	

Liwa, 30 Oktober 2025

**KEPALA DINAS
KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**



SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I

Pembina TK.I
NIP. 19770521 200501 1 003

SEKRETARIS DINAS,

SRI HARTATI, S.Sos., M.M.

Pembina TK.I
NIP. 19710929 199903 2 010



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KUSMAWATI, S.IP.**

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **SRI HARTATI, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025



Pihak Kedua,

SRI HARTATI, S.Sos., M.M.

Pembina TK.I

NIP. 19710929 199903 2 010

Pihak Pertama,

KUSMAWATI, S.IP.

Penata TK. I

NIP. 19840108 200212 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang/bulan
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Laporan
3	Tersedianya laporan bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 laporan
4	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN :	2.779.237.396	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD :	1.365.800	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestan SKPD :	668.000	APBD
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran :	1.210.000	APBD

Jumlah Anggaran

2.782.481.196

Liwa, 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DINAS



SRI HARTATI, S.Sos., M.M.

Pembina TK.I

NIP. 19710929 199903 2 010

KASUBBAG KEUANGAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kusmawati", is written over the stamp area.

KUSMAWATI, S.IP.

Penata TK. I

NIP. 19840108 200212 2 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MIFTAHUL KHOIRI, S.E.**

Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Perencanaan Dinas Koperasi UKM dan
Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **SRI HARTATI, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,



SRI HARTATI, S.Sos., M.M.
Pembina TK.I
NIP. 19710929 199903 2 010

Pihak Pertama,

MIFTAHUL KHOIRI, S.E
Penata Muda TK.I
NIP. 19950609 201903 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen
4	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan
8	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 dokumen
9	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	umlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen
10	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang

11	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 paket
12	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket
13	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket
14	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	4 dokumen
15	Terlaksananya Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	12 laporan
16	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
17	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan
20	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
21	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit
22	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	14 unit
23	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	:	25.261.500	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	:	1.209.700	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	:	1.188.800	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	:	1.147.400	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	:	1.427.500	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	:	1.273.000	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	1.207.500	APBD
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	:	1.226.500	APBD
9	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	:	2.499.600	APBD
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	:	12.000.000	APBD
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	:	7.930.000	APBD
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	50.336.970	APBD
13	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	:	36.054.200	APBD

15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	:	8.380.000	APBD
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	:	5.850.000	APBD
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	:	87.199.000	APBD
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	:	7.850.000	APBD
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	:	2.420.000	APBD
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	:	125.984.300	APBD
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	:	56.491.200	APBD
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	:	79.375.000	APBD
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	:	21.612.000	APBD
24	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	:	20.722.700	APBD
Jumlah Anggaran			558.646.870	

Liwa, 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DINAS



SRI HARTATI, S.Sos., M.M.
Pembina TK.I
NIP. 19710929 199903 2 010

Plt. KASUBBAG UMUM DAN PERENCANAAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops.

MIFTAHUL KHOIRI, S.E.
Penata Muda TK.I
NIP. 19950609 201903 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DINA WARDIANA, S.E., M.M.**

Jabatan : Kasubag Tata Usaha UPTD PP-KUKM pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **SRI HARTATI, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,

SRI HARTATI, S.Sos., M.M.

Pembina TK.I

NIP. 19710929 199903 2 010

Pihak Pertama,

DINA WARDIANA, S.E., M.M.

Penata Muda Tk.I

NIP. 19781214 200801 2 010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang pelayanan	1 unit kerja

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	: 43.132.206,12	APBD
Jumlah Anggaran	43132206,12	

Liwa, 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DINAS



SRI HARTATI, S.Sos., M.M.

Pembina TK.I

NIP. 19710929 199903 2 010

KASUBBAG TU UPTD PP-KUKM



DINA WARDIANA, S.E., M.M.

Penata Muda TK. I

NIP. 19781214 200801 2 010



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROHANIAH, S.E.**

Jabatan : Staf pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **KUSMAWATI, S.IP.**

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



KUSMAWATI, S.IP.
Penata
NIP. 19840108 200212 2 002

Liwa, 30 Oktober 2025
Pihak Pertama,

ROHANIAH, S.E.
Penata Muda TK. I
NIP. 19890626 201903 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya informasi pelaporan keuangan yang akuntabel	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tepat Waktu	12 Laporan
2	Terlaksananya transaksi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Jumah Pelaksanaan Pengajuan mekanisme GU tepat waktu	24 kali
3	Terlaksananya pelaporan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan terentry di Aplikasi SIPD tepat waktu	12 laporan

Liwa, 30 Oktober 2025

KASUBBAG KEUANGAN



KUSMAWATI, S.IP.

Penata

NIP. 19840108 200212 2 002

STAF

ROHANIAH, S.E.

Penata Muda TK. I

NIP. 19890626 201903 2 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUL YATI, S.E**

Jabatan : Staf pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **MIFTAHUL KHOIRI, S.E.**

Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,

MIFTAHUL KHOIRI, S.E.

Penata Muda TK.I

NIP. 19950609 201903 1 001

Pihak Pertama,

YUL YATI, S.E

Penata

NIP. 19800601 201001 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya rapat evaluasi kinerja pegawai	Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi kinerja pegawai	4 kali
2	Terlaksananya rekapitulasi presensi pegawai	Jumlah rekapitulasi presensi pegawai	12 dokumen
3	Terlaksananya inventarisasi tamu dinas	Jumlah dokumen kunjungan tamu	12 dokumen
4	Terlaksananya inventarisasi tagihan langganan listrik, air & internet kantor	Jumlah dokumen tagihan langganan listrik, air dan internet	12 dokumen

Liwa, 30 Oktober 2025

Pit. KASUBBAG UMUM DAN PERENCANAAN



MIFTAHUL KHOIRI, S.E.

Penata Muda TK.I

NIP. 19950609 201903 1 001

STAF

YUL YATI, S.E

Penata

NIP. 19800601 201001 2 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURLIANA, S.I.P., M.Si.**

Jabatan : Kabid Koperasi UKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

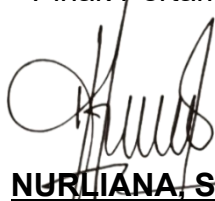
Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,


SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I
Pembina TK.I
NIP. 19770521 200501 1 003

Pihak Pertama,

NURLIANA, S.I.P.
Penata TK.I
NIP. 19820608 200212 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	35%
2	Meningkatnya kualitas manjerial koperasi	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	6%
3	Meningkatnya Kualitas Produk UMKM	Persentase UMKM terfasilitasi	9%

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI :	68.792.000	APBD
2 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN :	47.474.000	APBD
3 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM) :	318.533.900	APBD
Jumlah Anggaran	434.799.900	

KEPALA DINAS
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I
Pembina TK.I
NIP. 19770521 200501 1 003

LIWA, 30 Oktober 2025

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM

NURLIANA, S.I.P., M.Si.
Penata TK.I
NIP. 19820608 200212 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SOLMI, S.Sos.**

Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NURLIANA, S.I.P., M.Si.**

Jabatan : Kabid Koperasi UKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten
Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Liwa, 30 Oktober 2025



Pihak Kedua,

NURLIANA, S.I.P., M.Si.

Penata TK.I

NIP. 19820608 200212 2 001

Pihak Pertama,

SOLMI, S.Sos.

Penata TK.I

NIP. 19770628 200801 2 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	20 Unit Usaha
2	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	500 Unit usaha
3	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	25 orang

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro :	39.030.000	APBD
2 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro :	192.152.000	APBD
3 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan :	32.774.400	APBD
Jumlah Anggaran	263.956.400	

Liwa, 30 Oktober 2025

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM


NURLIANA, S.I.P., M.Si.
 Penata TK.I
 NIP.19820608 200212 2 001

PENGAWAS KOPERASI AHLI

MUDA


SOLMI, S.Sos.
 Penata TK. I/III d
 NIP. 19770628 200801 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Jl. Mawar No. 01 Way Mengaku – Liwa Telp (0728) 21086, 21698Liwa 47812

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURYADI, S.E.**

Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NURLIANA, S.I.P., M.Si.**

Jabatan : Kabid Koperasi UKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten
Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,



NURLIANA, S.I.P., M.Si

Penata TK.I

NIP. 19820608 200212 2 001

Pihak Pertama,

SURYADI, S.E.

Penata TK.I

NIP. 19751003 201001 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

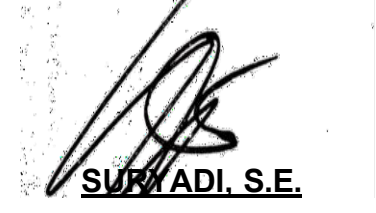
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	30 orang

	Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	47.474.000	APBD
Jumlah Anggaran	47.474.000	

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM



NURLIANA, S.I.P., M.Si.
Penata TK.I
NIP.19820608 200212 2 001

Liwa, 30 Oktober 2025
PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA


SURIADI, S.E.
Penata TK. I/III d
NIP. 19751003 201001 1001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. INDAWAN, S.I.P.**

Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NURLIANA, S.I.P., M.Si.**

Jabatan : Kabid Koperasi UKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten
Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,

NURLIANA, S.I.P., M.Si.

Penata TK.I

NIP. 19820608 200212 2 001

Pihak Pertama,

M. INDAWAN, S.I.P.

Penata TK.I

NIP. 19690207 199303 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	58 Unit Usaha

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengeawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	68.792.000	APBD

Jumlah Anggaran 68.792.000

Liwa, 30 Oktober 2025

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA



NURLIANA, S.I.P., M.Si.
Penata TK.I

NIP.19820608 200212 2 001

M. INDAWAN, S.I.P.
Penata TK. I/III d

NIP. 19690207 199303 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LENDRA JAYA, A.Md.**

Jabatan : Kepala UPTD PP-KUKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NURLIANA, S.I.P., M.Si.**

Jabatan : Kabid Koperasi UKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



NURLIANA, S.I.P., M.Si.

Penata TK.I

NIP. 19820608 200212 2 001

LENDRA JAYA, A.Md.

Penata Muda TK.I

NIP. 19790116 201101 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

A	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring dana bergulir	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	40 unit usaha

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	54.577.500	APBD

Liwa, 30 Oktober 2025

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM



NURLIANA, S.I.P., M.Si.

Penata TK.I

NIP.19820608 200212 2 001

KEPALA UPTD PP-KUKM

LENDRA JAYA, A.Md.

Penata TK.I

NIP. 19790116 201903 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMAD FAIZAL, A.Md.**

Jabatan : Staf Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NURLIANA, S.I.P., M.Si.**

Jabatan : Kabid Koperasi dan UKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Pertama,

RAHMAD FAIZAL, A.Md.

Pengatur

NIP. 19950907 202203 1 007

Pihak Kedua,



NURLIANA, S.I.P., M.Si.

Penata TK.I

NIP. 19820608 200212 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya data pendukung penyusunan KAK Kegiatan Pelatihan Koperasi	Jumlah dokumen KAK	1 dokumen
2	Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan koperasi	Jumlah Pelaksanaan Rapat	4 kali
3	Tersedianya data pendukung kegiatan Pembinaan dan Pengembangan UMKM	Jumlah Data UMKM terbina dan terfasilitasi	1 dokumen
4	Terlaksananya dokumen evaluasi kegiatan sektor koperasi	Jumlah data pendukung evaluasi	1 dokumen
5	Tersedianya dokumen KAK Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah dokumen KAK	1 dokumen
6	Tersedianya data bahan penyusunan evaluasi kegiatan di sektor UMKM	Jumlah data pendukung evaluasi	1 dokumen
7	Tersusunnya data Keragaan Koperasi yang valid	Jumlah dokumen data keragaan koperasi	1 dokumen

Liwa, 30 Oktober 2025

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM



NURLIANA, S.I.P., M.Si.
Penata TK.I
NIP.19820608 200212 2 001

STAF

RAHMAD FAIZAL, A.Md.
Pengatur
NIP. 19950907 202203 1 007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERIYANTO, S.Kom.**

Jabatan : Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I.**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025



Pihak Kedua,

SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I

Pembina TK.I

NIP. 19770521 200501 1 003

Pihak Pertama ,

HERIYANTO, S.Kom.

Pembina/ IV.a

NIP. 19800203 200804 1 001

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING :	55.707.100	APBD
2	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN :	46.402.600	APBD
3	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI :	26.073.000	APBD
	Jumlah Anggaran	128.182.700	

KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN



Handwritten signature

HERIYANTO, S.Kom.
Pembina
NIP. 19800203 200804 1 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESI HAIRONI, S.E.**

Jabatan : Penjamin Mutu Produk Ahli Muda pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **HERIYANTO, S.Kom.**

Jabatan : Kabid Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,

HERIYANTO, S.Kom.

Pembina

NIP. 19800203 200804 1 001

Pihak Pertama,

DESI HAIRONI, S.E.

Penata TK.I

NIP. 19761112 201001 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	48 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting : pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem perdagangan	55.707.100	APBD

Jumlah Anggaran 55.707.100

Liwa, 30 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

PENJAMIN MUTU PRODUK AHLI MUDA



HERIYANTO, S.Kom.

DESI HAIRONI, S.E.

Pembina/ IV.a

Penata TK.I

NIP. 19800203 200804 1 004

NIP. 19761112 201001 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MASDARIA, S.H.**

Jabatan : Pengawas Kemetrolagian Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **HERIYANTO, S.Kom.**

Jabatan : Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten
Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



HERIYANTO, S.Kom.

Pembina

NIP. 19800203 200804 1 001

MASDARIA, S.H.

Penata TK.I

NIP. 19750830 200902 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah Alat ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	285 unit
2	Terlaksananya pembinaan pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	100 orang

	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera-Tera Ulang :	28.355.600	APBD
2. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal :	18.047.000	
Jumlah Anggaran	46.402.600	

Liwa, 30 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

HERIYANTO, S.Kom.

Pembina

NIP. 19800203 200804 1 004

PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI MUDA

MASDARIA, S.H.

Penata TK. I

NIP. 19750830 200902 2 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAMADHANI, S.A.N.**

Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **HERIYANTO, S.Kom.**

Jabatan : Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,

HERIYANTO, S.Kom.

Pembina

NIP. 19800203 200804 1 001

Pihak Pertama,

RAMADHANI, S.A.N.

Penata

NIP. 19870422 201422 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses penggunaan produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran Produk Dalam negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Market place, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	5 UMKM

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemasaran dan peningkatan Penggunaa		
Produk Dalam Negeri Tingkat kabupaten/Kota	:	26.073.000
Jumlah Anggaran		26.073.000

Liwa, 30 Oktober 2025

KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN



HERIYANTO, S.Kom.
Pembina/ IV.a
NIP. 19800203 200804 1 004

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA



RAMADHANI, S.A.N
Penata
NIP. 19870422 201422 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SIGIT SAMSENO, SE.**

Jabatan : Staf Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **HERIYANTO, S.Kom.**

Jabatan : Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,



HERIYANTO, S.Kom.

Pembina
NIP. 19800203 200804 1 001

Pihak Pertama,



SIGIT SAMSENO, SE.
Penata
NIP. 19750307 200604 1 011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya data UTTP	Jumlah data UTTP yang valid	1 dokumen
2	Tersedianya data pengawasan Metrologi	Jumlah dokumen pengawasan Metrologi	1 dokumen
3	Terlaksanya Pengawasan Metrologi	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Metrologi	12 kali

Liwa, 30 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN



HERIYANTO, S.Kom.

Pembina
NIP. 19800203 200804 1 004

STAF



SIGIT SAMSENO, SE.

Penata
NIP. 19750307 200604 1 011



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGIL MUHARAM, ST.**

Jabatan : Staf Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **HERIYANTO, S.Kom.**

Jabatan : Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,

HERIYANTO, S.Kom.

Pembina

NIP. 19800203 200804 1 001

Pihak Pertama,

AGIL MUHARAM, ST.

Penata Muda

NIP. 19880816 202203 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya data harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah dokumen data yang valid	48 laporan
2	Tersedianya data pendukung pertanggung jawaban sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem perdagangan	Jumlah dokumen pertanggung jawaban	1 dokumen

Liwa, 30 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN



HERIYANTO, S.Kom.

Pembina

NIP. 19800203 200804 1 004

STAF

AGIL MUHARAM, ST.

Penata Muda

NIP. 19880816 202203 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EKA TEGUH WAHYUDI, S.E., M.M.**

Jabatan : Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I.**

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I

Pembina TK.I

NIP. 19770521 200501 1 003



EKA TEGUH WAHYUDI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19840918 201104 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Persentase los, kios, dan ruko yang direvitalisasi	60%

	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN :	7.872.980.427	APBD
Jumlah Anggaran	7.872.980.427	

KEPALA DINAS
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



SYAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd.I

Pembina TK.I
NIP. 19770521 200501 1 003

Liwa, 30 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

EKA TEGUH WAHYUDI, S.E., M.M

Pembina
NIP. 19840918 201104 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NAZIR, S.E.**

Jabatan : Penuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **EKA TEGUH WAHYUDI, S.E., M.M.**

Jabatan : Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,



EKA TEGUH WAHYUDI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19840918 201104 1 001

Pihak Pertama,

NAZIR, S.E.

Penata TK.I

NIP. 19731116 200604 1 010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen

Sub Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1. Pembinaan dan Pengendalian
Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan :

572.131.700

APBD

Jumlah Anggaran

572.131.700

Liwa, 30 Oktober 2025

**KEPALA BIDANG PENGLOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PASAR**



EKA TEGUH WAHYUDI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19840918 201104 1 001

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NAZIR, S.E.

Penata TK.I

NIP. 19731116 200604 1 010



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIRMAN, S.H.**

Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **EKA TEGUH WAHYUDI, S.E., M.M.**

Jabatan : Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,

EKA TEGUH WAHYUDI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19840918 201104 1 001

Pihak Pertama,

WIRMAN, S.H.

Penata

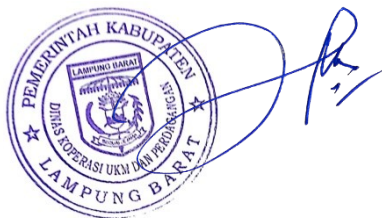
NIP. 19810707 200801 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Ketertiban dan Pengamanan Pedagang	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Pedagang, tempat parkir dan jalan di lingkungan pasar	12 kali

KEPALA BIDANG PENGLOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PASAR



EKA TEGUH WAHYUDI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19840918 201104 1 001

Liwa, 30 Oktober 2025
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
AHLI MUDA

WIRMAN, S.H.

Penata TK.I

NIP. 19810707 200801 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALI AKBAR, S.I.P.**

Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **EKA TEGUH WAHYUDI, S.E., M.M.**

Jabatan : Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Pasar pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EKA TEGUH WAHYUDI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19840918 201104 1 001

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Pertama,

ALI AKBAR, S.I.P.

Penata

NIP. 19721107 200701 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen KAK Pengadaan Barang/Jasa	4 dokumen
2	Tersedianya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen HPS	24 dokumen

Liwa, 30 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PENGLOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PASAR



EKA TEGUH WAHYUDI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19840918 201104 1 001

PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

ALI AKBAR, S.IP.

Penata TK.I

NIP. 19721107 200701 1 007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERNA UTAMI, S.E.**

Jabatan : Kepala UPT PLUT pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NURLIANA, S.I.P.,M.Si.**

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi UKM dan
Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,

NURLIANA, S.I.P.,M.Si

Penata TK. I

NIP. 19820608 200212 2 001

Pihak Pertama,

ERNA UTAMI, S.E.

Penata Muda TK. I

NIP. 19810609 200902 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Jumlah dan Wirausaha yang didata	Jumlah UMKM yang terdata di UPTD PLUT KUMKM 2024 (by name by NIK)	2500 Unit usaha
2	Terfasilitasi Koperasi UMKM dan Wirausaha yang dilayani	Jumlah unit usaha Koperasi UMKM dan Wirausaha yang dilayani	200 Unit usaha
3	Terfasilitasi Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi memperoleh perizinan	Jumlah unit usaha Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi memperoleh perizinan	200 Unit usaha
4	Terfasilitasi Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi memperoleh akses pemasaran	Jumlah unit usaha Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi memperoleh akses pemasaran	250 Unit usaha
5	Terfasilitasi Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi memperoleh pembiayaan formal	Jumlah unit usaha Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi memperoleh pembiayaan formal	125 Unit usaha
6	Terfasilitasi Koperasi UMKM dan Wirausaha yang bermitra dengan Usaha Menengah / Usaha Besar	Jumlah unit usaha Koperasi UMKM dan Wirausaha yang bermitra dengan Usaha Menengah / Usaha Besar	125 Unit usaha
7	Terfasilitasi Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi meningkat omsetnya	Jumlah unit usaha Koperasi UMKM dan Wirausaha yang didampingi meningkat omsetnya	125 Unit usaha
8	Tersedianya Layanan PLUT	Jumlah Layanan PLUT	10 Layanan
9	Terlaksananya Inkubasi Bisnis	Jumlah UMKM yang diinkubasi	5 Tenant

KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM



NURLIANA, S.I.P., M.Si

Penata TK. I

NIP. 19820608 200212 2 001

Liwa, 30 Oktober 2025

KEPALA UPT PLUT PP-KUMKM

ERNA UTAMI, S.E.

Penata Muda TK. I

NIP. 19810609 200902 2 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **IRWAN, S.IP.**

Jabatan Kepala Sub Bagian UPT PLUT Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdag
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama **ERNA UTAMI, S.E.**

Jabatan Kepala UPT PLUT pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupa
Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Liwa, 30 Oktober 2025

Pihak Kedua,



ERNA UTAMI, S.E.
Penata Muda TK.I
NIP. 19810609 200902 2 005

Pihak Pertama,



IRWAN, S.IP.
Penata TK.I
NIP. 19800922 200212 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat pada UPT PLUT	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
2	Terlaksananya Administrasi Pencatatan dan Registrasi Aset UPT PLUT	Jumlah laporan pencatatan asset	12 laporan
3	Terlaksananya Administrasi dan Pencatatan Penggunaan Gedung PLUT	Jumlah laporan Penggunaan gedung PLUT	12 laporan
4	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kantor PLUT	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan gedung plut	12 bulan
5	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor PLUT	Jumlah Bulan pemeliharaan gedung PLUT	12 bulan
6	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian UPT PLUT	Jumlah kelengkapan administrasi pegawai	7 dokumen

Liwa, 30 Oktober 2025

KEPALA UPT PLUT


ERNA UTAMI, S.E.
 Penata Muda TK.I
 NIP. 19810609 200902 2 005

KASUBBAG UPT PLUT

IRWAN, S.IP.
 Penata TK.I
 NIP. 19800922 200212 1 004

DOKUMENTASI PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI TAHUN 2025





DOKUMENTASI KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN TEKNIS UMKM TAHUN 2025 HARI KE 1



DOKUMENTASI KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN TEKNIS UMKM TAHUN 2025 HARI KE 2



PENYERAHAN SERTIFIKAT HALAL SELF DECLARE



PENYERAHAN SERTIFIKAT HALAL SELF DECLARE

